

**PENGARUH SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(SIPD), SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI), *GOOD
GOVERNANCE*, DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH PADA BADAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

SKRIPSI



Oleh:

Sinta Angraini

NIM. 220502110003

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**PENGARUH SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(SIPD), SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI), *GOOD
GOVERNANCE*, DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH PADA BADAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Mempoleh Gelar Sarjana

Akuntansi (S. Akun)



Oleh:

Sinta Angraini

NIM. 220502110003

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD), SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI), *GOOD GOVERNANCE*, DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SKRIPSI

Oleh

Sinta Angraini

NIM :220502110003

Telah Disetujui Pada Tanggal 4 Juni 2026

Dosen Pembimbing,



Zuraidah, M.S.A

NIP. 197612102009122001

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD),
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI), *GOOD GOVERNANCE*, DAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SKRIPSI

Oleh

Sinta Angraini

NIM :220502110003

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)

Pada 29 Juni 2026

Susunan Dewan Penguji:

- 1 Ketua Penguji
Ahmad Fahrudin Alamsyah, SE.,MM.AK.,CA
NIP.197411221999031001
- 2 Anggota Penguji
Dr. Nanik Wahyuni, SE.,M.Si.,AK.CA
NIP. 197203222008012005
- 3 Sekretaris Penguji
Zuraidah,M.S.A
NIP. 197612102009122001

Tanda Tangan



Disahkan Oleh :
Ketua Program Studi,



Dr. Kholila, M.S.A

NIP. 19707192019032010

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinta Angraini

NIM : 220502110003

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memnuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

"PENGARUH SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD), SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI), *GOOD GOVERNANCE*, DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO"

Adalah hasil karya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggungjawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakutltas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa adanya paksaan dari siapapun.

Malang 14 Juni 2026

Hormat sava



Sinta Angraini

NIM: 220502110003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini penulis persembahkan untuk: Kedua orang tua penulis tercinta Bapak Sulaiman dan Ibu Amina tersayang, serta kakak saya Iskandar Syah yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis. Dua orang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak keduanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya menempuh pendidikan sampai tahap atas dan dasar. Kepada bapak tercinta, terimakasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai ke tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terimakasih sudah menjadi seorang laki-laki yang bertanggungjawab penuh terhadap keluarga. Untuk ibuku tersayang, terimakasih atas segala motivasi, pesan, do'a, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terimakasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah pudar oleh waktu, atas kesabaran pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, terimakasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Terakhir, terimakasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya. Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk Bapak, Ibu, Kakak, dan seluruh Keluarga Besar

MOTTO

“Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir kedunia, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya, dan aku membuat ayahku bekerja tiap hari hingga Lelah, jadi aku pastikan lelahnya tidak sia-sia”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap”

(Q.S. Al Insyirah ayat 6-8)

“Jangan takut jatuh, sebab yang tak pernah memanjatlah yang tak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tak pernah gagal hanyalah mereka yang tak pernah melangkah. Dan jangan takut salah sebab dari kesalahan pertama, kita bisa belajar menemukan jalan yang benar di langkah berikutnya.”

(Buya Hamka)

“Perang telah usai, aku bisa pulang

Kubaringkan panah dan berteriak MENANG!!!”

(Nadin Amiza)

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), *Good Governance*, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pemerintah Kota Probolinggo” dapat diselesaikan secara tepat waktu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini terselesaikan berkat bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.EI selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Kholila, SE., MSA., AK., CA., CFA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Dr. Zuraidah, M.S.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, arahan, serta dorongan kepada penulis. Dengan dukungan beliau selalu menjadi pendorong bagi penulis untuk terus bertumbuh dan menyelesaikan proses akademik ini dengan penuh keyakinan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen dan staf akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan selama masa studi penulis.
6. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda tercinta Sulaiman terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan semangat serta selalu mengajarkan kebaikan dalam hidup penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Sehat selalu dan panjang umur karna “Bapak” harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.

7. Pintu surgaku, Ibunda tercinta Amina yang selalu menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa. Terimakasih selalu berjuang untuk penulis, berkat do'a dan dukungannya sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan panjang umur karena "Ibu" harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup penulis.
8. Kakak tercinta Iskandar Syah dan istinya Siti Aisyah terimakasih banyak atas dukungan secara moril maupun materil, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Keponakan tercinta Nur Aini Fitria Aisyah, terimakasih atas kelucuan, kekhawatirannya, dan perhatiannya untuk penulis yang membuat penulis selalu bersemangat dan selalu membuat penulis senang, sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
10. Keluarga besar penulis terimakasih selalu memberikan dukungan, semangat, dan do'a kepada penulis skripsi ini bisa terselesaikan.
11. Bapak Bodik dan Ibu Kholifah serta keluarganya, terimakasih banyak atas dukungan secara moril maupun materil untuk penulis, terimakasih juga atas segala dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
12. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, yaitu pemilik nama Moh. Aditya Anugrah Putra terimakasih telah berjuang bersama dan membersamai penulis selama penyusunan skripsi dalam kondisi apapun, telah menjadi support sistem dan mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi dalam penyusunan skripsi. Dan terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan, pendamping dalam segala hal menemani, memberikan dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis hingga penyusunan skripsi ini selesai.
13. Teman-teman seperjuangan penulis yang sangat penulis cintai dan penulis banggakan yang selalu setia mendukung dan membantu apa yang selama ini penulis hadapi, juga tak kalah penting kehadirannya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih karena telah hadir dan menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang telah berkontribusi banyak dari awal hingga akhir penulisan, memberikan semangat, mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah dan selalu ada untuk penulis baik dalam suka maupun duka. Terimakasih juga penulis ucapkan karena sudah mau selalu

mengajari, membantu dan menemani disaat-saat penulis butuhkan dan semangat yang telah diberikan sepanjang perjalanan skripsi ini.

14. Seluruh pihak Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), terkhusus Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, penulis mengucapkan terimakasih banyak untuk kontribusi dan dukungannya terhadap isi skripsi ini, dan terimakasih buat motivasi dan pengalaman selama penulis PPL disana, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan hasil yang optimal.
15. Terakhir, anak perempuan kedua dan harapan orang tuanya, Sinta Angraini. Ya, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah berjuang tanpa henti. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terimakasih kepada hati yang ikhlas, meski banyak hal yang diluar prediksi. Terimakasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terimakasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang tuhan berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Penulis berdo'a agar Langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin.

Sebagai ungkapan terimakasih, semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan atas seluruh bantuan, bimbingan, dan dukungan yang telah didedikasikan kepada peneliti. Akhir kata, peneliti berharap semoga hasil penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat, baik bagi peneliti secara pribadi maupun bagi para pembaca dan pengembang ilmu pengetahuan di masa mendatang. Aamiin.

Malang 14 Mei 2026

Penulis

Sinta Angraini

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
المخلص.....	xvii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.3.1. Tujuan Penelitian	8
1.3.2. Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis.....	23
2.2.1 Teori yang Relevan	23
2.2.2 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	27
2.2.3 Sistem Pengendalian Internal (SPI)	30
2.2.4 <i>Good Governance</i>	31
2.2.5 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	33
2.2.6 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).....	35
2.3 Kerangka Konseptual	36

2.4	Hipotesis Penelitian.....	37
2.4.1	H1 : Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Keuangan Pemerintah Daerah	38
2.4.2	H2 : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	39
2.4.3	H3 : Pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	39
2.4.4	H4 : Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	40
BAB III		42
METODE PENELITIAN.....		42
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	42
3.2	Lokasi Penelitian	42
3.3	Populasi dan Sampel	43
3.3.1	Populasi.....	43
3.3.2	Sampel.....	43
3.4	Teknik Pengambilan Sampel.....	44
3.5	Data dan Jenis Data	45
3.6	Teknik Pengumpulan Data	45
3.7	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	46
3.8	Analisis Data	50
BAB IV		54
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		54
4.1	Hasil Penelitian	54
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	54
4.1.2	Deskripsi Responden	55
4.1.3	Analisis Statistik Deskriptif	59
4.1.4	Skema Model Partial Least Square (PLS)	61
4.1.5	Pengujian Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	62
4.1.6	Pengujian Struktural Model (<i>Inner Model</i>).....	65
4.1.7	Uji Hipotesis	68
4.2	Pembahasan.....	69

4.2.1	Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	70
4.2.2	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan daerah	71
4.2.3	Pengaruh <i>Good Governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan daerah.....	72
4.2.4	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan daerah	73
BAB V		74
KESIMPULAN.....		74
4.3	Kesimpulan.....	74
4.4	Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN.....		83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	37
Gambar 4. 1 Skema Model Partial Least Square	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	49
Tabel 4. 1 Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin	55
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	56
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Nama Organisasi Pemerintahan	57
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama/Masa Kerja	58
Tabel 4. 5 Hasil Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4. 6 Hasil uji Outer Loading	62
Tabel 4. 7 Hasil Uji Average Variance Extracted (AVE).....	63
Tabel 4. 8 Cross Loading	64
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas.....	65
Tabel 4. 10 Hasil uji R-Square.....	66
Tabel 4. 11 Hasil Q-Square.....	66
Tabel 4. 12 Hasil Uji F-Square	67
Tabel 4. 13 Hasil Uji Hipotesis.....	68

ABSTRAK

Sinta Angraini, 2026, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), *Good Governance*, dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pemerintah Kota Probolinggo”

Pembimbing : Dr. Zuraidah M.S.A.

Kata Kunci : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), *Good Governance*, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Kualitas Laporan Keuangan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), *Good Governance*, dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Probolinggo. Kualitas laporan keuangan menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terutama di era digital yang menuntut pengelolaan keuangan dilakukan secara cepat, tepat, dan terbuka. Walaupun Pemerintah Kota Probolinggo telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterlambatan penyusunan laporan, gangguan jaringan sistem, serta keterbatasan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan aplikasi keuangan berbasis digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh penggunaan teknologi, tetapi juga oleh pengendalian internal yang baik, penerapan tata kelola pemerintahan yang benar, dan kemampuan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Analisis data dilakukan menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel, baik secara parsial maupun simultan. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari SIPD, SPI, *Good Governance*, dan kualitas SDM, sedangkan variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD, SPI, *Good Governance*, dan kualitas SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan SIPD membantu proses pelaporan keuangan menjadi lebih efektif, tepat waktu, dan akurat karena sistem yang digunakan sudah terintegrasi secara digital. SPI berperan dalam memperkuat pengawasan serta meminimalkan kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Selain itu, penerapan prinsip *Good Governance* mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kualitas SDM juga menjadi faktor yang sangat penting karena kemampuan dan pemahaman aparatur terhadap sistem serta standar akuntansi pemerintahan sangat memengaruhi kualitas laporan yang dihasilkan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memerlukan dukungan teknologi yang baik, sistem pengendalian internal yang kuat, penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, serta sumber daya manusia yang kompeten dan profesional.

ABSTRACT

Sinta Angraini, 2026, *THESIS*. Title: "The Influence of the Regional Government Information System (SIPD), Internal Control System (SPI), Good Governance, and Human Resources Quality on the Quality of Regional Government Financial Reports in Probolinggo City Government Agencies"

Supervisor : Dr. Zuraidah M.S.A.

Keywords : Regional Government Information System (SIPD), Internal Control System (SPI), Good Governance, Human Resources Quality, Financial Report Quality.

This study was conducted to determine the extent of influence of the Regional Government Information System (SIPD), Internal Control System (SPI), Good Governance, and Human Resources Quality (HR) on the Quality of Regional Government Financial Reports in the Probolinggo City Government. The quality of financial reports is an important indicator in creating a transparent and accountable government, especially in the digital era that demands financial management to be carried out quickly, accurately, and openly. Although the Probolinggo City Government has obtained an Unqualified Opinion (WTP), in practice several obstacles are still found, such as delays in preparing reports, system network disruptions, and limited employee capabilities in operating digital-based financial applications. These conditions indicate that the quality of financial reports is not only influenced by the use of technology, but also by good internal controls, the implementation of proper governance, and the ability of government officials in carrying out their duties. This study uses a quantitative approach with an explanatory research type. Research data were obtained by distributing questionnaires to employees of regional apparatus organizations (OPD) within the Probolinggo City Government who are involved in regional financial management. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) to determine the effect of each variable, both partially and simultaneously. The independent variables in this study consisted of SIPD, SPI, Good Governance, and human resource quality, while the dependent variable was the quality of local government financial reports.

The results showed that SIPD, SPI, Good Governance, and human resource quality had a positive and significant influence on the quality of local government financial reports. The implementation of SIPD helps make the financial reporting process more effective, timely, and accurate because the system used is digitally integrated. SPI plays a role in strengthening oversight and minimizing errors in financial recording and reporting. Furthermore, the application of Good Governance principles can increase transparency, accountability, and the effectiveness of regional financial management. The quality of human resources is also a crucial factor because the ability and understanding of government accounting systems and standards significantly impact the quality of the resulting reports. Therefore, improving the quality of local government financial reports requires good technological support, a strong internal control system, the implementation of effective governance, and competent and professional human resources.

الملخص

سينتا أنغريني، 2026. أطروحة
والحوكمة الرشيدة، وجودة (SPI) ونظام الرقابة الداخلية، (SIPD) العنوان: تأثير نظام معلومات الحكومة الإقليمية
الموارد البشرية على جودة التقارير المالية للحكومة الإقليمية في وكالات حكومة مدينة بروبولينغو
المشرف: د. زبيدة، ماجستير في المحاسبة
والحوكمة الرشيدة، وجودة (SPI) ونظام الرقابة الداخلية، (SIPD) الكلمات المفتاحية: نظام معلومات الحكومة الإقليمية
الموارد البشرية، وجودة التقارير المالية

(SPI) ونظام الرقابة الداخلية، (SIPD) أجريت هذه الدراسة لتحديد مدى تأثير نظام معلومات الحكومة الإقليمية
على جودة التقارير المالية للحكومة الإقليمية في حكومة مدينة (HR) والحوكمة الرشيدة، وجودة الموارد البشرية
بروبولينغو. تعد جودة التقارير المالية مؤشراً مهماً في خلق حكومة شفافة وخاضعة للمساءلة، خاصة في العصر الرقمي
الذي يتطلب إدارة مالية تتسم بالسرعة والدقة والعلانية. وعلى الرغم من حصول حكومة مدينة بروبولينغو على رأي غير
إلا أنه لا تزال هناك عقبات في الممارسة العملية، مثل التأخير في إعداد التقارير، واضطرابات في (WTP) متحفظ
شبكة النظام، ومحدودية قدرات الموظفين في تشغيل التطبيقات المالية الرقمية. وتشير هذه الظروف إلى أن جودة التقارير
المالية لا تتأثر فقط باستخدام التكنولوجيا، بل أيضاً بوجود رقابة داخلية جيدة، وتطبيق حوكمة سليمة، وقدرة المسؤولين
الحكوميين على أداء مهامهم

تعتمد هذه الدراسة نهجاً كمياً بنوع بحث تفسيري. تم الحصول على بيانات البحث عن طريق توزيع استبيانات على موظفي
داخل حكومة مدينة بروبولينغو ممن يشاركون في الإدارة المالية الإقليمية. تم تحليل (OPD) منظمات الأجهزة الإقليمية
لتحديد تأثير كل متغير، سواء (SEM-PLS) البيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية بالمربعات الصغرى الجزئية
والحوكمة، (SPI) ونظام، (SIPD) بشكل جزئي أو متزامن. وتتكون المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة من نظام
الرشيدة، وجودة الموارد البشرية، بينما المتغير التابع هو جودة التقارير المالية للحكومة الإقليمية

والحوكمة الرشيدة، وجودة الموارد البشرية لها تأثير إيجابي ومعنوي، (SPI) ونظام، (SIPD) أظهرت النتائج أن نظام
في جعل عملية إعداد التقارير المالية أكثر (SIPD) على جودة التقارير المالية للحكومة الإقليمية. يساعد تطبيق نظام
دوراً في تعزيز الرقابة (SPI) فعالية وفي الوقت المناسب وأكثر دقة لأن النظام المستخدم متكامل رقمياً. ويلعب نظام
وتقليل الأخطاء في التسجيل وإعداد التقارير المالية. وعلاوة على ذلك، فإن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة يمكن أن يزيد
من الشفافية والمساءلة وفعالية الإدارة المالية الإقليمية. وتعد جودة الموارد البشرية أيضاً عاملاً حاسماً لأن قدرة الموظفين
وفهمهم لأنظمة ومعايير المحاسبة الحكومية تؤثر بشكل كبير على جودة التقارير الناتجة. وبناءً على ذلك، يتطلب تحسين
جودة التقارير المالية للحكومة الإقليمية دعماً تكنولوجياً جيداً، ونظام رقابة داخلية قوياً، وتطبيق حوكمة فعالة، وموارد
بشرية كفوة ومهنية

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan gabungan dari beberapa laporan keuangan organisasi perangkat daerah dalam pemerintah daerah tersebut (Salsabila, 2024). Menurut Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 paragraf 24, laporan keuangan dirancang untuk memberikan informasi yang sesuai mengenai posisi keuangan serta seluruh aktivitas yang dilakukan entitas pelaporan selama satu periode. Keberadaan laporan keuangan sangat penting untuk melihat bagaimana sumber daya ekonomi dikelola dalam mendukung operasi pemerintahan, menilai kondisi dan kapasitas keuangan, mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi, serta memastikan apakah entitas pelaporan telah mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku. Kualitas laporan keuangan sangat ditentukan oleh bagaimana proses mulai dari identifikasi, pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, hingga pengikhtisaran setiap transaksi dan kejadian keuangan dilakukan, termasuk bagaimana hasil akhirnya di tafsirkan (Yulianda *et al.*, 2022).

Dengan adanya perkembangan teknologi dalam era globalisasi seperti sekarang ini, mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, dimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kualitas laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya memengaruhi opini audit BPK, tetapi juga berdampak pada efektivitas alokasi anggaran, kredibilitas pemerintah, serta kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga pemerintah (Ramadhani & Yaya, 2024). Laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai alat pertanggungjawaban publik atas pengelolaan sumber daya keuangan serta sebagai dasar evaluasi kinerja keuangan daerah. *World Bank*, (2023) menegaskan bahwa peningkatan kualitas sistem manajemen publik menjadi kunci dalam memperkuat kredibilitas fiskal dan integritas lembaga

pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut *Nations*, (2022) mencatat bahwa penerapan sistem informasi pemerintahan berbasis digital memiliki peranan besar dalam mendorong akuntabilitas sektor publik, khususnya dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Badan Pemeriksaan Hasil Keuangan BPK RI, (2024), opini audit atas LKPD menjadi tolak ukur utama dalam menilai integritas dan kepatuhan fiskal suatu daerah. Kualitas laporan keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan berlandaskan integritas. Seperti dalam penelitian Maspaitella & Mokodompit, (2022) yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang andal berperan penting dalam membangun kepercayaan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) badan pemeriksaan keuangan (BPK) tahun 2023, yang dimana ditemukan 9.261 temuan senilai 18,19 triliun pada semester 1 tahun 2023 yang sebagian besar berkaitan dengan lemahnya sistem pengendalian internal, keterlambatan proses pelaporan, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan (BPK, 2023).

Yang dimana berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Probolinggo tahun 2022 oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD, 2023) masih termasuk dalam kondisi tersebut, meskipun pemerintah kota probolinggo sudah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut-turut selama beberapa tahun terakhir, yang menunjukkan adanya pencapaian positif dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik (BPK RI, 2024). Bukan berarti proses pelaporan keuangan berjalan tanpa hambatan. Dilapangan, masih ditemukan berbagai permasalahan administratif dan teknis, khususnya di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), seperti keterlambatan proses penyusunan dokumen keuangan yaitu surat permintaan pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM), dan surat perintah pencairan dana (SP2D). Permasalahan ini seringkali disebabkan oleh kendala jaringan yang masi belum optimal dan kemampuan

apatur dalam mengoperasikan aplikasi keuangan berbasis digital yang digunakan dalam SIPD (Muttaqin *et al.*, 2023).

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah pusat mewajibkan penggunaan berbagai sistem dan kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Salah satu langkah utamanya adalah penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang tercantum dalam Permendagri No. 70 Tahun 2019 yang dipertegas melalui Permendagri No. 77 Tahun 2020 mengenai pengelolaan keuangan daerah. SIPD berfungsi menghubungkan secara elektronik proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan agar informasi keuangan yang dihasilkan lebih tepat waktu dan akurat (Fitriani & Solikhin, 2024). Penerapan sistem tersebut juga ditujukan untuk memperkuat efektivitas pengendalian internal dan meningkatkan kualitas data keuangan pemerintah daerah (Delone & McLean, 2003), keberhasilan implementasi SIPD bergantung pada kualitas informasi, kualitas layanan sistem, serta kepuasan pengguna. Oleh karena itu, permasalahan dan keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) belum sepenuhnya menjamin peningkatan akurasi dan transparansi laporan keuangan apabila tidak disertai dengan penguatan sistem pengendalian internal (SPI) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. dalam memanfaatkannya.

Permasalahan lainnya mencakup lemahnya koordinasi antar unit kerja, keterbatasan kemampuan SDM dalam pengoperasian sistem, serta belum optimalnya penerapan prinsip *Good Governance* yang berpengaruh pada proses pengawasan keuangan (Ardiansyah *et al.*, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan adanya gap antara penerapan sistem dan hasil yang diharapkan, sehingga diperlukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah kota probolinggo.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa SIPD merupakan platform digital terpadu yang berperan besar dalam meningkatkan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, ketepatan hingga pelaporan keuangan secara elektronik. Penerapan SIPD di pemerintah kota probolinggo berfungsi meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih transparan, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi (SAP). Fitriasari, (2024) mengungkapkan bahwa penerapan SIPD secara signifikan meningkatkan kualitas laporan keuangan karena sistem ini mengurangi kesalahan manual dan memudahkan pengecekan data antar unit. Dengan pencatatan elektronik, setiap transaksi bisa dipantau secara *real time* sehingga laporan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Pituringsih *et al.*, (2025) juga menjelaskan bahwa SIPD membantu menghubungkan kemampuan SDM dengan kualitas laporan keuangan. Jika SDM kompeten, penggunaan SIPD membuat penyusunan laporan lebih cepat, dan meminimalkan manipulasi, sehingga memperkuat integrasi data antarperangkat daerah. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Napitupulu *et al.*, (2024) yang menunjukkan bahwa SIPD mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi keuangan publik apabila didukung dengan pelatihan dan teknologi yang memadai. Jadi pengaruh SIPD terletak pada kemampuan membuat proses pelaporan lebih terintegrasi, efisien, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap keuangan pemerintah kota probolinggo.

SPI berpengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota probolinggo karena berfungsi memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan efektif, akurat dan sesuai aturan. SPI yang kuat mampu mencegah terjadinya kesalahan pencatatan, penyimpangan, serta meningkatkan keandalan dan transparansi laporan keuangan. Menurut Rahmawati *et al.*, (2022), efektivitas SPI berperan sebagai mekanisme pengawasan yang menjaga keakuratan data keuangan dan memperkuat hubungan antara kompetensi SDM dengan kualitas laporan. Hanif *et al.*, (2023) juga menemukan bahwa kelemahan SPI menjadi alasan utama rendahnya pengungkapan laporan keuangan di pemerintah daerah, termasuk kota probolinggo. Oleh karena itu, SPI yang kuat dan didukung penggunaan SIPD secara terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta

kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu, penguatan SPI menjadi langkah penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan, andal, dan sesuai dengan SAP di pemerintah kota probolinggo.

Penerapan *Good Governance* terbukti berdampak besar pada kualitas laporan keuangan pemerintah kota probolinggo. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi publik menjadi fondasi penting untuk membangun pengelolaan keuangan yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika prinsip ini dijalankan secara konsisten, proses keuangan menjadi lebih terbuka, risiko penyimpangan dapat ditekan, dan laporan keuangan yang dihasilkan lebih sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam penelitian Ardiansyah *et al.*, (2025), menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance* yang baik mampu memperkuat integritas pemerintah serta meningkatkan kualitas laporan melalui pengawasan internal yang efektif. Temuan serupa oleh Hasmuddin *et al.*, (2024), yang menyatakan bahwa lemahnya penerapan prinsip tata kelola justru menurunkan transparansi fiskal dan partisipasi publik, sehingga laporan keuangan menjadi kurang andal. Selain itu Khadijah & Juniarti, (2025) juga menegaskan bahwa *Good Governance* berperan besar dalam memperkuat Sistem Pengendalian Internal (SPI), yang pada akhirnya meningkatkan ketepatan dan akuntabilitas laporan keuangan. Dengan demikian, pelaksanaan *Good Governance* secara konsisten di Pemerintah Kota Probolinggo berkontribusi langsung terhadap terwujudnya laporan keuangan yang transparan, kredibel, dan mencerminkan tata kelola keuangan publik yang baik.

Kualitas SDM berperan penting dalam menentukan baik atau tidaknya kualitas laporan keuangan pemerintah kota probolinggo. Ketika aparaturnya benar-benar memahami aturan, mampu menggunakan sistem seperti SIPD, dan mengetahui cara menerapkan prinsip akuntansi pemerintahan, maka proses pencatatan hingga pelaporan dapat berjalan dengan tepat dan sesuai dengan SAP. Hasil penelitian Rahmawati *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa kemampuan SDM sangat memengaruhi kualitas laporan keuangan, terutama ketika didukung oleh sistem pengendalian internal yang berjalan

dengan baik. Naida, (2024) juga menekankan bahwa literasi digital, penguasaan teknologi, dan kemampuan analisis aparatur menjadi faktor penting dalam keberhasilan penggunaan SIPD, yang berdampak pada transparansi dan ketepatan laporan keuangan.

Meskipun berbagai penelitian yang telah membahas faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, masih terdapat beberapa kesenjangan (*research gap*) penelitian yang masih belum terjawab. Pertama, Sebagian besar penelitian terdahulu, seperti penelitian Rahmawati *et al.*, (2022) dan Fitriasari, (2024) yang hanya meneliti hubungan antar dua variabel, misalnya antara kompetensi SDM dan SPI, tanpa memasukkan peran SIPD yang mulai diterapkan secara nasional sejak 2021. Mediaty *et al.*, (2025) menekankan pentingnya kompetensi SDM, namun belum menguji keterkaitan SDM, *Good Governance*, dan efektivitas SIPD dalam satu model analisis yang terpadu. Selain itu, penelitian Wahyudi *et al.*, (2024) dan Naida, (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan SIPD dan SPI dipengaruhi kapasitas aparatur, tetapi belum melihat bagaimana koordinasi antar perangkat daerah memengaruhi hasil pelaporan, terutama di daerah dengan birokrasi yang kompleks seperti Kota Probolinggo.

Kedua, Dari sisi teori, penelitian sebelumnya juga belum menggabungkan *Agency Theory* dan *Stewardship theory* untuk menjelaskan peran aparatur sebagai agen sekaligus pengelola amanah publik. Akibatnya, hubungan antara motivasi individu, efektivitas pengendalian, dan penggunaan teknologi belum tergambar secara utuh. Ketiga, Penelitian di Jawa Timur, khususnya di Kota Probolinggo, juga masih terbatas dan cenderung deskriptif, belum menguji model kuantitatif yang menggabungkan variabel SIPD, SPI, *Good Governance*, dan SDM secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut melalui pendekatan empiris yang lebih komprehensif dan berfokus pada faktor-faktor yang menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian permasalahan dan kesenjangan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini menjadi relevan dan strategis untuk dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman serta solusi komprehensif

menyeluruh terhadap permasalahan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya di Kota Probolinggo. Dengan menggabungkan empat variabel utama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), *Good Governance*, dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam satu kerangka penelitian yang komprehensif, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan serta pengaruh masing-masing variabel terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang ada, tetapi juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang praktis bagi pengambil kebijakan di Pemerintah Kota Probolinggo dalam menyusun strategi peningkatan kualitas laporan keuangan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan di era digital sekaligus menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel. Dengan memanfaatkan data empiris yang relevan, landasan teori yang kuat, serta mempertimbangkan karakteristik lokal, penelitian ini tidak hanya memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai prinsip *Good Governance*, tetapi juga memiliki urgensi tinggi baik secara akademis maupun praktis. Kontribusi penelitian ini diharapkan mendukung reformasi birokrasi, memperkuat akuntabilitas sektor publik, dan mendorong terwujudnya pemerintahan yang profesional serta sesuai dengan amanat regulasi dan tuntutan masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berasarkan pemaparan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

2. Apakah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah *Good Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengidentifikasi secara empiris berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya pada Pemerintah Kota Probolinggo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dalam pengembangan teori maupun praktik pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Adapun tujuan penelitian ini secara lebih spesifik dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana penerapan SIPD berkontribusi terhadap peningkatan keandalan, ketepatanwaktuan, dan akurasi informasi dalam laporan keuangan, serta mengidentifikasi kendala implementasi yang mungkin memengaruhi efektivitas sistem tersebut.
2. Menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan ini difokuskan untuk mengukur peran SPI sebagai mekanisme pengawasan internal yang dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan, mengurangi kesalahan pencatatan, serta menjaga integritas dan keamanan aset keuangan daerah.

3. Menganalisis pengaruh *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi mampu memperkuat keandalan laporan keuangan dan mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
4. Menganalisis pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan ini diarahkan untuk mengetahui bagaimana kompetensi, integritas, dan pemahaman SDM terhadap sistem akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
5. Menguji pengaruh simultan antara SIPD, SPI, *Good Governance*, dan Kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Probolinggo. Tujuan ini untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai hubungan komprehensif antarvariabel dan untuk mengidentifikasi faktor dominan yang paling berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur akuntansi sektor publik dan tata Kelola pemerintah dengan memperkuat pemahaman mengenai pengaruh sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), sistem pengendalian internal (SPI), *Good Governance*, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini juga mendukung penerapan *Stewardship theory* dan *Agency Theory* dalam konteks pemerintah daerah dengan menunjukkan bahwa teknologi informasi, pengendalian internal yang efektif, serta tata kelola yang baik berperan penting dalam meningkatkan akurasi, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan keuangan publik.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Pemerintah Kota Probolinggo: hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas sistem informasi keuangan, memperkuat sistem pengendalian internal, dan mendorong tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
- b) Bagi BPK dan BPKP: hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko di pemerintah daerah.
- c) Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini dapat menjadi rujukan empiris dalam mengembangkan kajian lanjutan mengenai hubungan antara sistem informasi pemerintahan, kualitas SDM, dan tata kelola keuangan daerah di berbagai konteks wilayah di Indonesia.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam Perspektif Islam Sri Rahmany & Fatimah (2020)	Variabel Independen : Sistem Pengendalian Internal Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi, dan studi Pustaka BPKAD Kabupaten Bengkalis	Temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasi sistem pengendalian internal berperan penting dalam mengurangi potensi kesalahan maupun tindakan kecurangan, sekaligus meningkatkan tingkat keandalan dan akuntabilitas laporan keuangan. Berbagai komponen SPI, seperti kegiatan pemantauan, komunikasi yang efektif, pemisahan fungsi kerja, serta mekanisme pengawasan, telah dijalankan dengan baik di BPKAD. Secara

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				umum, keberadaan SPI memberikan kontribusi positif dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan nilai-nilai akuntabilitas dalam perspektif Islam.
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Peran Sistem Pengendalian Internal sebagai Pemediasi Evi Rahmawati, Sari Sonita, Arif W. N. Kholid & Hafiez Sofyani (2022)	Variabel Independen : Kompetensi SDM Mediasi : Sistem Pengendalian Internal (SPI) Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif Data primer dengan kuesioner SEM-PLS	Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal sama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta ditemukan bahwa SPI memiliki peran memediasi secara signifikan antara kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya, semakin tinggi

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				kompetensi SDM maka semakin baik penerapan sistem pengendalian internal, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini mengeaskan pentingnya pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur dalam menjaga efektivitas SPI.
3	Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kota Probolinggo Izzul Muttaqin, Ulfa Adiranti &	Variabel Independen : Implementasi SIPD Variabel Dependen : Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kualitatif Deskriptif (pendekatan teori Van Meter & Van Horn)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di BPPKAD Kota Probolinggo masih belum opyimal karena keterbatasan sistem dan kendala teknis, sehingga pelaksanaan masih dilakukan secara parallel dengan aplikasi SIMRAL, meskipun demikian, SIPD berpotensi besar

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	Rahayu Dewi Zakiyah (2023)			meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan jika dilakukan penyempurnaan sistem dan peningkatan kompetensi pengguna.
4	Pengaruh Penerapan Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BPKAD Kabupaten Jember)	Variabel Independen : Sistem Infomasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), Pemanfaatan Teknologi Informasi Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif Data primer melalui kuesioner (45 responden) Analisis regresi berganda dengan SPSS 26	Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), serta pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, baik secara bersama-sama maupun secara individual. Penerapan SIPD yang optimal mampu meningkatkan kemudahan dalam proses pengelolaan dan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	April Dwi Wulandari & Anik Yulianti (2023)			pengolahan data keuangan, sedangkan keberadaan sistem pengendalian internal yang efektif berperan dalam memastikan ketepatan, keandalan, dan kredibilitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, serta dukungan teknologi informasi meningkatkan kecepatan dan efisiensi pelaporan. Penelitian ini menegaskan pentingnya digitalisasi akuntansi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
5	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Variabel Independen : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),	Kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dan observasi pada	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SIP di Kabupaten Probolinggo berjalan dengan baik dan massif, namun

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	Kabupaten Probolinggo Sundari, Sri Juni Woro Astuti & Esa Wahyu Endarti (2023)	<i>Good Governance</i> Variabel Dependen : Kualitas laporan keuangan	Pemerintah Kabupaten Probolinggo	masih terdapat kendala seperti kurangnya variasi format laporan, celah akurasi data, dan minimnya sosialisasi. Meskipun demikian, SIPD berkontribusi dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>) dan meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
6	<i>The Effect of Implementing Local Government Information System on the Quality of Local Government Financial Reports Moderated by Human Resource Competence</i>	Variabel Independen :Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif, analisis Partial Least Square (PLS) menggunakan software WarpPLS dengan 128 responden dari OPD di Kabupaten Tojo Una-Una	Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, kompetensi sumber daya manusia (SDM) terbukti

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
	Nasrun Naida, Andi Mattulada Amir, Muhammad Din, M. Ikbil A, Fikry Karim (2023)	Pemerintah Daerah (LKPD)		berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara SIPD dan kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, kualitas laporan keuangan akan semakin baik apabila implementasi SIPD berjalan optimal dan didukung oleh SDM yang memiliki kemampuan serta kompetensi yang memadai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan SIPD secara efektif.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
7	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bandung Barat Dinda Putri & Nunung Aini Rahma (2023)	Variabel Independen : Sistem Pengendalian Internal (SPI), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda Uji validitas & reliabilitas, uji t, uji f, koefisien determinasi (menggunakan SPSS V25)	Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) memberikan pengaruh positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, baik ketika diuji secara individual maupun secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas penerapan SPI yang diiringi dengan kompetensi SDM yang semakin baik akan mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Selain itu, nilai koefisien determinasi sebesar 71,8% mengungkapkan bahwa kedua variabel

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menjelaskan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat.
8	Pengaruh Implementasi SIPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Dimoderasi oleh Teknologi Informasi Lidya Fitriani & Agus Solikhin (2024)	Variabel Independen : Implementasi Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Pengelolaan Keuangan, Teknologi Informasi Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Kuantitatif (SEM-PLS) menggunakan sampel pejabat OPD di Provinsi Jambi	Penelitian ini menemukan bahwa implementasi SIPD memiliki pengaruh langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah dan kualitas LKPD, serta berpengaruh tidak langsung melalui variabel intervening pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, teknologi informasi mampu memperkuat hubungan antara implementasi SIPD dan pengelolaan keuangan daerah, yang menunjukkan pentingnya kesiapan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				teknologi dan SDM dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
9	Pengaruh Penerapan Aplikasi SIPD dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kota Bandung) Dina Fitrasari (2024)	Variabel Independen : Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Variabel Dependen : Kualitas Laporan Keuangan	Kuantitatif Data primer melalui kuesioner Analisis regresi Uji t dan R ² (55,8%)	Penelitian ini membuktikan bahwa penerapan aplikasi SIPD dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan SIPD membantu proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih akurat dan tepat waktu, sedangkan kompetensi SDM menjadi faktor penting yang menentukan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem dan memahami standar akuntansi pemerintah. Kedua

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				faktor tersebut berkontribusi 55.8% terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah kota Bandung.
10	<i>The Impact of Government Accounting Standards Implementation, Internal Control Systems, an Human Resource Competence on Regional Financial Report Quality</i> Elfita Yennia, Achmad Tavip Junaedi & Evelyn Wijaya (2024)	Variabel Independen : <i>Government Accounting Standards Implementation, Internal Control Systems, Human Resaource Competence</i> Variabel Dependen : <i>Regional Financial Report Quality</i>	Kualitatif 96 responden Analisis SEM (Smart PLS)	Temuan penelitian mengindikasikan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, penerapan standar akuntansi pemerintahan serta sistem pengendalian internal tidak menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut mengisyaratkan bahwa mutu laporan keuangan tidak semata-mata

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
				ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi dan mekanisme formal yang berlaku, melainkan sangat dipengaruhi oleh kemampuan personel dalam memahami, menerapkan, serta mengelola informasi keuangan secara tepat dan efektif. Selain itu, penelitian ini mendukung teori resource based view yang menempatkan sumber daya manusia sebagai aset strategis yang mampu mendorong peningkatan kinerja dalam pelaporan keuangan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan pada tabel yang sudah disajikan, dapat ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dari sepuluh penelitian terdahulu yang telah dikaji, sebagian besar penelitian memiliki fokus pada variabel yang sejalan

dengan penelitian ini, yaitu SIPD, SPI, *Good Governance*, serta Kualitas SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Persamaannya terletak pada tujuan utama penelitian yang dimana sama-sama mengkaji faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Meskipun terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya meneliti dua atau tiga variabel secara parsial dan belum menguji pengaruh simultan dari keempat variabel secara komprehensif. Selain itu, penelitian terdahulu dilakukan pada daerah berbeda-beda yang memiliki karakteristik organisasi dan kapasitas SDM yang berbeda dengan Kota Probolinggo. Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam hal integrasi variabel, lokasi, serta pendekatan teoritis yang digunakan, dimana penulis menggabungkan *Agency Theory* dan *Stewardship theory* untuk menjelaskan peran aparatur pemerintah sebagai agen sekaligus pengelola Amanah publik.

Perbedaan lainnya juga terletak pada pendekatan penelitian dan konteks empiris yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *structural equation modelling-partial least square* (SEM-PLS) guna menganalisis pengaruh simultan dari keempat variabel terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sebagian dari penelitian terdahulu menggunakan metode regresi linier sederhana atau analisis deskriptif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif, akurat, serta relevan terhadap kondisi aktual Pemerintah Kota Probolinggo yang sedang berupaya meningkatkan efektivitas penerapan SIPD dan memperkuat pengendalian internal untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori yang Relevan

1. Teori Stewardship (*Stewardship theory*)

Teori *Stewardship* pertama kali diperkenalkan oleh James H. Davis, F. Davis Schoorman, dan Lex Donaldson pada tahun 1991 (Davis *et al.*, 1997).

Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa aparat pemerintah bertindak sebagai pengelola Amanah yang berorientasi pada kepentingan pihak pemberi mandate (*principal*). Dalam kondisi ini, mereka tidak didorong oleh tujuan atau keuntungan pribadi, melainkan berupaya mengutamakan pemenuhan harapan, tujuan, dan kepentingan *principal* yang telah memberikan kepercayaan serta tanggung jawab kepada mereka (Sanjaya, 2017). Teori *Stewardship* adalah teori yang menjelaskan situasi dimana aparat pemerintah tidak berorientasi pada kepentingan pribadi, melainkan lebih berfokus pada pencapaian tujuan utama organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* (pengelola Amanah) memiliki motivasi untuk bertindak sejalan sesuai kepentingan *principal*, selain itu sebagai *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berkomitmen untuk mewujudkan keberhasilan tujuan organisasinya. Teori ini dirancang untuk membantu peneliti memahami situasi ketika pihak manajemen pada sebuah entitas berperan sebagai *steward* (pengelola Amanah) yang terdorong untuk mengemban amanah sebaik mungkin demi kepentingan *principal* (Davis *et al.*, 1997) dalam (Sanjaya, 2017).

Teori *Stewardship* berlandaskan pada pandangan filosofis tentang hakikat manusia yang dianggap memiliki sifat dapat dipercaya, bertanggungjawab, serta menjunjung tinggi integritas dan kejujuran terhadap sesama. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa aparat pemerintah dipandang sebagai pihak yang dapat diandalkan untuk bertindak secara optimal demi kepentingan publik secara luas maupun kepentingan pemegang saham secara khusus (Sanjaya, 2017). Pemisah antara fungsi kepemilikan pada masyarakat dengan fungsi pengelolaan pada pemerintah menjadi semakin nyata. Dalam teori ini pemilik sumber daya (*capital suppliers/principals*) mempercayakan (*trust* = amanah) pengelolaan sumber daya tersebut kepada pihak lain (*steward* = manajemen) yang lebih mampu dan siap. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak dipandang sebagai hubungan yang penuh kecurigaan dan konflik kepentingan, melainkan

sebagai hubungan kepercayaan yang dibangun atas dasar tanggungjawab moral dan profesionalisme ((Zoelisty *et al*) dalam (Sanjaya, 2017)).

Menurut Davis *et al.*, (1997) *steward* akan mengutamakan kepentingan organisasi dan pemangku kepentingan di atas kepentingan pribadi karena merasa keberhasilan organisasi juga merupakan bentuk keberhasilan dirinya. Pandangan ini diperkuat oleh Raharjo, (2007) yang menjelaskan bahwa *Stewardship theory* menekankan pada nilai-nilai moral, tanggungjawab sosial, dan etika profesi sebagai landasan perilaku organisasi dalam akuntansi publik. Dalam perspektif akuntansi sektor publik, teori ini menjadi sangat relevan karena sumber daya yang dikelola adalah milik masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Dengan demikian, teori ini menjadi paradigma alternatif yang menekankan kepercayaan (*trust*), loyalitas, dan komitmen sebagai penggerak utama organisasi publik dibandingkan pengawasan dan hukuman sebagaimana dalam teori agensi.

Dalam penelitian kuantitatif yang menelaah pengaruh SIPD, SPI, *Good Governance*, dan Kualitas SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, teori *Stewardship* menjadi landasan teoritis utama karena relevan dengan nilai-nilai dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki peran ganda yaitu sebagai pengelola sumber daya publik (*steward*) dan sebagai pelopor pertanggungjawaban kepada masyarakat (*principal*). Dalam konteks ini, *Stewardship theory* menegaskan bahwa motivasi intrinsik, seperti rasa tanggungjawab moral, komitmen terhadap kepentingan publik, dan kebanggaan profesional bukan hanya sekedar insentif finansial atau ancaman sanksi, tetapi menjadi pendorong utama bagi aparatur dalam menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan relevan bagi publik (Davis *et al.*, 1997). Dengan diterapkannya prinsip-prinsip *stewardship*, aparatur pemerintah diharapkan memiliki: a) Komitmen moral untuk menjaga integritas pelaporan keuangan, b) Tanggungjawab sosial dalam menggunakan sumber daya publik secara efisien, c) Orientasi terhadap pencapaian tujuan organisasi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini, teori *Stewardship* menjadi penting karena menjelaskan hubungan positif antara penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), efektivitas sistem pengendalian internal (SPI), kualitas sumber daya manusia (SDM) dan praktik *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teori ini memberikan logika teoritis bahwa semakin kuat nilai-nilai *Stewardship* tertanam dalam budaya organisasi pemerintah daerah, maka semakin efektif juga implementasi keempat variabel independent tersebut dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan (Leiwakabessy, 2020).

2. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) dijelaskan oleh Jensen dan Meckling sebagai bentuk perjanjian kerja sama antara dua belah pihak atau lebih, yang dimana pihak *principal* (pemberi wewenang) memberikan tanggung jawab kepada pihak *agent* (penerima wewenang) untuk melaksanakan tugas atau layanan tertentu atas nama *principal*. Dalam hubungan ini, *agent* diberi kewenangan untuk mengambil keputusan yang dianggap mewakili kepentingan *principal* dan penerima wewenang (*agent*), yang bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah disepakati bersama (Jensen & Meckling, 1976).

Teori ini berasumsi bahwa hubungan antara *principal* dan *agent* mengandung potensi konflik kepentingan (*Agency conflict*) serta asimetri informasi (*informasi asymmetry*) yang terjadi ketika *agent* memiliki informasi lebih banyak daripada *principal* dan berpotensi menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi. Untuk meminimalkan konflik tersebut, dibutuhkan mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan sistem pelaporan yang akurat agar *Agency cost* dapat ditekan (Jensen & Meckling, 1976).

Dalam sektor publik, khususnya pada pemerintahan daerah, teori agensi berperan dalam menggambarkan hubungan antara masyarakat atau lembaga legislatif sebagai *principal* dengan pemerintah sebagai *agent* yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangan daerah. Pemerintah selaku *agent*, berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan

tersebut melalui penyajian laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian sebelumnya menegaskan bahwa mutu laporan keuangan pemerintah daerah berfungsi sebagai alat pengawasan yang membantu memastikan *agent* bertindak sejalan dengan kepentingan *principal* serta meminimalkan terjadinya asimetri informasi kedua pihak (Mediaty *et al.*, 2025).

Menurut perspektif teori agensi, variable independen yang mencakup mekanisme pengawasan, sistem kontrol, tata kelola organisasi, kemampuan agen, sistem pengendalian internal, serta tingkat transparansi memiliki pengaruh terhadap variable dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Mekanisme kontrol yang efektif berperan penting dalam menekankan biaya keagenan serta mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan *agent*, sehingga mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sebaliknya, apabila sistem pengawasan dan kontrol tidak berjalan dengan baik, *agent* berpotensi bertindak untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas laporan keuangan melalui praktik seperti manipulasi data, penyajian informasi yang akurat, maupun keterlambatan dalam pelaporan (Mediaty *et al.*, 2025).

2.2.2 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem nasional yang berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara elektronik, sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 391, dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyediakan informasi Pemerintah Daerah melalui sistem yang terkelola dengan baik (Fitriasari, 2024). Hal tersebut diperkuat dengan adanya Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan untuk menyediakan data pembangunan dan keuangan daerah yang akurat, terpadu, serta mudah diakses sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah (Permendagri No.70 Tahun 2019).

Dalam penelitian Fitriyani, (2024) SIPD dipandang mampu mengurangi kesalahan manual melalui otomatisasi proses pencatatan dan pelaporan, sehingga efisiensi dan ketelitian data keuangan meningkat. Dalam penelitian Kahfi, (2025) juga menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan SIPD berkontribusi langsung pada kualitas laporan keuangan karena sistem ini menyediakan informasi *real-time* yang mendukung pengawasan anggaran dan keputusan fiskal. Selain itu, *Delone & McLean*, (2003) menjelaskan bahwa keberhasilan sistem informasi seperti SIPD dipengaruhi oleh kualitas sistem, kualitas informasi, serta manfaat yang dirasakan pengguna. Oleh karena itu SIPD tidak hanya bertindak sebagai alat administratif, tetapi juga berperan strategis dalam memperkuat akuntabilitas fiskal, transparansi dan kualitas laporan keuangan daerah.

Keberhasilan penerapan SIPD ditentukan oleh berbagai sfaktor internal maupun eksternal yang memengaruhi efektivitas sistem dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuan utama implementasi SIPD adalah untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dengan menyediakan informasi yang akurat serta mudah diakses oleh publik, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah (Fitriani & Solikhin, 2024). Menurut Fitriani & Solikhin, (2024), keberlanjutan penggunaan SIPD pada setiap perangkat daerah terutama oleh kualitas sumber daya manusia, kesiapan teknologi, dukungan aturan, dan komitmen organisasi.

Kualitas aparatur juga menjadi faktor inti karena pemahaman operator terhadap fitur sistem, ketepatan input data, serta kemampuan mengatasi masalah teknis sangat memengaruhi kelancaran pelaporan. Selain itu Muttaqin *et al.*, (2023) mengungkapkan bahwa penerapa SIPD masih menghadapi hambatan seperti gangguan jaringan, lemahnya integrasi antar unit, dan terbatasnya pelatihan, sehingga pelaporan keuangan masih dilakukan bersamaan dengan aplikasi lain seperti SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan). Faktor regulasi juga berpengaruh karena pemerintah daerah harus menyesuaikan proses kerja sesuai Permendragi No.70 Tahun 2019 yang mewajibkan penggunaan SIPD pada seluruh proses pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, kemampuan SDM, dukungan pimpinan, kesiapan teknologi, dan kepatuhan terhadap aturan menjadi penentu utama keberhasilan SIPD.

Adapun indikator keberhasilan penerapan SIPD menurut penelitian *Delone & McLean*, (2016) meliputi 6 komponen utama yaitu a) kualitas sistem, b) kualitas informasi, c) kualitas pelayanan, d) intensitas pengguna, e) kepuasan pengguna f) manfaat bersih yang saling berinteraksi dalam mendukung efektivitas sistem. Pada indikator kualitas sistem, merujuk pada seberapa baik sebuah sistem informasi mampu bekerja secara andal, memberikan respons yang cepat, serta mudah digunakan oleh pengguna sehingga kebutuhan informasinya dapat terpenuhi. Pada indikator kualitas informasi yang baik dapat memberikan dampak tinggi bagi penggunanya, seperti membantu pengambilan keputusan, menghemat waktu, serta meningkatkan kinerja, sehingga pada akhirnya menumbuhkan kepuasan pengguna terhadap sistem informasi. Pada indikator kualitas pelayanan, dapat melihat selisih antara harapan pengguna dan pengalaman nyata yang mereka rasakan, kualitas ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu berwujud (*tangible*) yang mencakup ketersediaan perangkat keras dan lunak, keandalan (*reliability*) yang menunjukkan kemampuan sistem untuk berfungsi secara konsisten, daya tanggap (*responsiveness*) berupa kecepatan staf dalam membantu pengguna, jaminan (*assurance*) terkait kompetensi pegawai dalam menjalankan tugasnya, serta empati (*empathy*) yang tercermin dari perhatian sistem dan petugas terhadap kebutuhan pengguna. Indikator intensitas pengguna dapat diukur melalui dua bentuk yaitu penggunaan nyata dan penggunaan yang dilaporkan. Indikator kepuasan pengguna dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan sikap (*attitude*) pengguna, tingkat kepuasan tersebut menjadi faktor yang mendukung kemampuan administrator maupun pengguna dalam mengoperasikan sistem secara optimal sehingga dapat mencapai hasil penggunaan yang memuaskan. Indikator manfaat bersih menggambarkan sejauh mana penggunaan sistem informasi memberikan hasil positif terhadap kinerja pengguna, baik pada level individu maupun organisasi. Manfaat ini meliputi kemudahan memperoleh informasi, kualitas informasi yang lebih baik, serta fleksibilitas dalam menggunakannya.

Dengan demikian, SIPD berperan penting dalam mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui mekanisme otomatisasi dan pengawasan yang lebih efektif, serta mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data yang akurat dan *real-time* (Anthony *et al.*, 2025). Dalam penelitian Fitriah, n.d. menambahkan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi keuangan daerah secara transparan, sehingga memperkuat kepercayaan (*trust*) dan legitimasi pemerintah daerah.

2.2.3 Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan serangkaian proses yang melekat dalam setiap aktivitas dan operasional organisasi. Pelaksananya dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan Bersama seluruh pegawai sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi. Sistem ini dirancang untuk memberikan tingkat keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien (PP No.60 Tahun, 2008). Selain itu, SPI bertujuan memastikan informasi keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya, asset negara terlindungi dengan baik, serta seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian Mukarromah, (2021) menegaskan bahwa SPI berfungsi sebagai alat pengawasan internal yang mampu mendeteksi kesalahan serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan secara preventif maupun detektif. Melalui penerapan SPI yang konsisten dan terstruktur, organisasi publik dapat menjaga keandalan data akuntansi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mengurangi potensi kecurangan (*fraud*) dan kesalahan material yang dapat merusak integritas laporan keuangan.

Keberhasilan penerapan sistem pengendalian internal (SPI) dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, seperti, komitmen pimpinan, kualitas sumber daya manusia, struktur kerja yang jelas, serta budaya kerja organisasi yang mendukung pengawasan, karena integritas, ketelitian, serta kemampuan analisis risiko menjadi dasar pengendalian yang efektif

(Wulandari & Yuliati, 2023). Tujuan utama SPI adalah memastikan kegiatan organisasi berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana strategis, laporan keuangan disusun dengan andal dan bebas dari salah saji material, dan asset pemerintah terlindungi dari penyalahgunaan, kehilangan, atau pemborosan yang tidak perlu (Hosana *et al.*, n.d.). Dalam perspektif *Agency Theory*, SPI berfungsi mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* melalui pengawasan sistematis dan penurunan asimetri informasi, yang meningkatkan keandalan laporan keuangan serta kepercayaan publik.

Indikator sistem pengendalian internal (SPI) diukur dengan lima komponen yaitu a) Lingkungan Pengendalian, b) Penilaian Risiko, c) Kegiatan Pengendalian, d) Informasi dan Komunikasi, e) Pemantauan (Rahmawati *et al.*, 2022). Lingkungan pengendalian berfokus pada integritas, etika, dan komitmen pimpinan dalam menciptakan budaya kerja yang mendukung pengawasan (Khadijah & Juniarti, 2025). Penilaian risiko menekankan proses identifikasi dan analisis potensi hambatan organisasi, sedangkan aktivitas pengendalian terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk meminimalkan risiko tersebut. Informasi dan komunikasi memastikan peyampaian data yang tepat, relevan, dan akurat bagi seluruh pihak terkait guna mendukung efektivitas pengendalian (Mukarromah, 2021). Pemantauan dilakukan melalui evaluasi berkelanjutan serta audit internal untuk memastikan pengendalian berjalan secara efektif dan konsisten.

2.2.4 *Good Governance*

Good Governance merupakan prinsip tata kelola pemerintah yang menekankan pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah untuk membangun pemerintahan yang bersih, responsive terhadap kebutuhan masyarakat, serta berfokus pada penyediaan layanan publik yang berkualitas (KPU PapuaPegunungan, 2025). *Good Governance* berfungsi sebagai fondasi penerapan pemerintah yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan wewenang sehingga mampu

memperkuat legitimasi pelayanan publik (Karso, 2022). Dalam penelitian Ardiansyah *et al.*, (2025), menekankan bahwa *Good Governance* menjadi elemen penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena memastikan seluruh tahapan penganggaran berjalan sesuai aturan dan dijalankan secara bertanggungjawab.

Beberapa faktor yang memengaruhi penerapan *Good Governance*, seperti komitmen pimpinan, budaya organisasi, kualitas SDM, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi. *Good Governance* berfungsi sebagai kerangka normatif yang memastikan proses pelaporan keuangan daerah dilakukan secara transparan, dapat dipercaya, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Ardiansyah *et al.*, 2025). Hal ini diperkuat oleh Hosana *et al.*, n.d. yang menegaskan bahwa *Good Governance* yang didukung oleh sistem pengendalian internal (SPI) yang kuat akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dibandingkan dengan implementasi parsial atau terpisah.

Indikator *Good Governance* terdiri atas lima prinsip utama yang saling terkait yaitu, a) transparansi, b) akuntabilitas, c) partisipasi, d) efektivitas dan efisiensi, dan e) kepatuhan hukum (Khadijah & Juniarti, 2025). Indikator transparansi mencakup keterbukaan informasi publik dan kemudahan akses terhadap data pengelolaan keuangan daerah. Indikator akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban aparatur yang mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan kinerja organisasi. Indikator partisipasi menunjukkan peran masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan pembangunan. Indikator efektivitas dan efisiensi menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan (Ardianti, 2018). Indikator kepatuhan hukum atau supremasi hukum menekankan penegakan aturan yang adil dan konsisten (Karso, 2022). Dalam islam, prinsip-prinsip *Good Governance* telah diajarkan sejak Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini menekankan pentingnya Amanah (akuntabilitas) dan keadilan (supremasi hukum) dalam pengelolaan urusan publik, selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

“Barang siapa yang Allah berikan kepadanya Amanah untuk mengurus urusan kaum muslim, lalu ia tidak menasihati mereka dan tidak berlaku baik kepada mereka, maka ia akan masuk surga bersama mereka” (HR.Muslim)”

Hadist ini menunjukkan bahwa pemimpin memiliki tanggungjawab moral dan spiritual untuk menjalankan Amanah dengan sebaik-baiknya, yang sejalan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam *Good Governance*.

2.2.5 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Mangkunegara dalam Philadhelphia *et al.*, (2020:21), kualitas sumber daya manusia tercermin dari tingkat pengetahuan, keterampilan, kompetensi, serta karakter individu yang dimiliki, yang secara langsung memengaruhi kinerja dalam melaksanakan pekerjaan. Kualitas SDM memiliki peranan yang sangat penting dalam memperkuat keterkaitan antarvariabel yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel, keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi faktor utama untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (Naida, 2024). Menurut Haluty dalam Sanjaya, (2017:25) manusia adalah makhluk dengan keistimewaan yang membedakannya dari makhluk lain, karena memiliki peran sebagai khalifah atau wakil Tuhan di bumi. Selain itu, manusia dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul menempati posisi

yang mulia di sisi Allah SWT. Seperti dalam firman Allah SWT. Dalam surah Al-Mujadilah Ayat 11, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu : “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang di beri ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Mujadilah:11).

Penguasaan pengetahuan akuntansi yang memadai berperan penting dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam menjalankan fungsi serta proses akuntansi tidak dapat diberikan kepada sembarang individu, melainkan harus dipercayakan kepada pihak yang memiliki kemampuan, pemahaman, dan keterampilan akuntansi yang sesuai agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara tepat dan efektif. Sumber daya manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan suatu organisasi, baik dalam lingkup lembaga maupun perusahaan. SDM menjadi elemen utama yang menentukan arah serta kemajuan organisasi tersebut. Secara mendasar, SDM merupakan individu-individu yang bekerja di dalam organisasi dan berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan (Sanjaya, 2017).

Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti pendidikan formal, pelatihan teknis, pengalaman kerja, pemahaman terhadap regulasi, dan kemampuan mengoperasikan teknologi informasi. Menurut penelitian Mediaty *et al.*, (2025) kualitas SDM mencerminkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola, menginterpretasikan, dan melaporkan data keuangan secara profesional sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan, standar pelaporan, dan regulasi yang berlaku. SDM yang kompeten dan terintegrasi tinggi akan mampu melaksanakan proses akuntansi dengan benar dan sesuai standar, memahami regulasi keuangan publik yang kompleks dan dinamis, serta

menggunakan sistem informasi keuangan secara efektif untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan bagi pengambilan keputusan.

Indikator kualitas sumber daya manusia (SDM) mencakup a) pengetahuan, b) keterampilan, c) kemampuan (Yenni *et al.*, 2024). Indikator pengetahuan mencakup dengan pemahaman terhadap regulasi, standar akuntansi publik (SAP), dan analisis laporan keuangan (Philadhelphia *et al.*, 2020). Indikator keterampilan mencakup kemampuan teknis dalam mengoperasikan aplikasi keuangan seperti SIPD yang terbukti berpengaruh pada ketepatanwaktuan pelaporan (Fitriasari, 2024). Sementara indikator kemampuan mencakup kemampuan berfikir dan mengelola pekerjaan, termasuk adaptasi dan pengambilan keputusan yang tepat, yang sangat diperlukan saat menghadapi perubahan dalam sistem informasi keuangan pemerintah (Mustaqmah & Putri, 2022).

2.2.6 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan mengemukakan bahwa laporan keuangan merupakan bentuk penyajian data keuangan yang tersusun secara teratur dan digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan serta seluruh transaksi yang terjadi pada suatu entitas pelaporan (Mustaqmah & Putri, 2022). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan hasil akhir dari serangkaian kegiatan yang meliputi pengenalan, pengukuran, dan pencatatan berbagai transaksi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. Laporan ini berfungsi sebagai sumber informasi yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan entitas tersebut serta sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang membutuhkan (Philadhelphia *et al.*, 2020). Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan internal maupun eksternal, termasuk masyarakat, lembaga legislatif, lembaga pengawas, dan investor potensial.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditentukan oleh berbagai aspek yang berperan dalam pengelolaan keuangan daerah,

antara lain kemampuan dan keahlian aparatur pemerintah, pemanfaatan sistem informasi pemerintahan, efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. Dalam penelitian Mustaqmah & Putri, (2022) menyatakan bahwa kemampuan mengoperasikan SIPD dan memahami SAP secara langsung meningkatkan ketepatan laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi seperti SIPD berkontribusi pada percepatan penyajian informasi dan ketepatan waktu pelaporan (Fitriasari, 2024). Selain itu penerapan sistem pengendalian internal yang kuat memastikan proses pencatatan hingga pelaporan berjalan sesuai dengan prosedur, sehingga meminimalkan kesalahan (PP No.17 Tahun, 2008). Penelitian (Ramadhani & Yaya, 2024) juga menegaskan bahwa SPI yang efektif mampu menjaga keandalan data keuangan. Dan di sisi lain, praktik *Good Governance* juga berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan (Ardiansyah *et al.*, 2025).

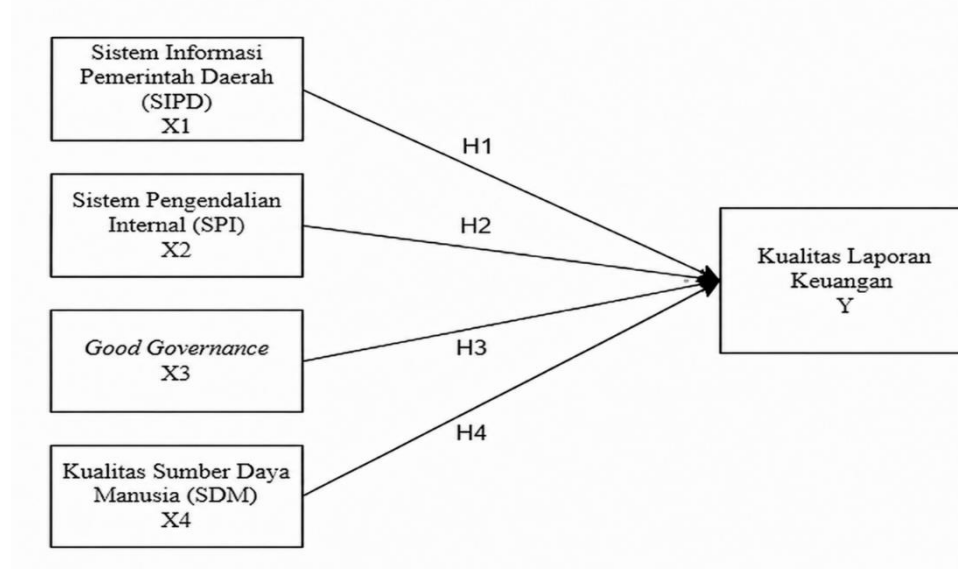
Indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dalam standar akuntansi pemerintah (SAP) mencakup empat karakteristik kualitatif utama, yaitu a) relevansi, b) terpercaya, c) dapat dibandingkan, dan d) dapat dipahami yang harus dipenuhi secara simultan untuk memastikan kegunaan informasi keuangan (Yenni *et al.*, 2024). Indikator relevansi mengacu pada kemampuan informasi dalam memengaruhi keputusan pengguna laporan dengan menyediakan informasi yang material, tepat waktu, dan memiliki nilai prediktif serta nilai umpan balik. Indikator terpercaya menunjukkan sejauh mana informasi bebas dari kesalahan material, bias, dan dapat diverifikasi sehingga pengguna dapat mengandalkan informasi tersebut. Indikator dapat dibandingkan memungkinkan analisis antar periode atau antar entitas pemerintah daerah untuk menilai kinerja dan tren keuangan. Sementara indikator dapat dipahami dalam menafsirkan informasi yang disajikan tanpa kesulitan signifikan.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pemaparan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah, peneliti mengidentifikasi bahwa sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), sistem pengendalian internal (SPI), *Good Governance*, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan variabel independent yang berpotensi memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Hal ini merujuk pada temuan empiris dan konsep teoritis yang menegaskan bahwa kinerja sistem informasi, efektivitas pengendalian internal, penerapan tata kelola yang baik, serta kompetensi aparatur merupakan faktor yang menentukan terbentuknya laporan keuangan yang andal, akurat dan sesuai dengan standar pemerintahan.

Dalam penelitian ini diperlukan penyusunan kerangka konseptual untuk memperjelas arah analisis serta hubungan antarvariabel yang diteliti. Sehingga disusunlah kerangka konseptual sebagai dasar penelitian ini, yaitu:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang disusun berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir yang telah dibangun. Dalam penelitian ini, hipotesis dirancang untuk menguji hubungan antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), *Good Governance*, dan

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Secara konseptual, keempat variabel independen tersebut diyakini memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, reliabilitas, serta efektivitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.1 H1 : Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berperan penting dalam mendukung proses pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah daerah, karena sistem ini menyediakan proses pengelolaan data keuangan yang terintegrasi, akurat, dan *real time* sehingga meminimalkan kesalahan manual serta meningkatkan keandalan informasi. Dalam perspektif *Agency Theory*, sistem yang transparan seperti SIPD membantu mengurangi asimetri informasi antara pemerintah sebagai *agent* dan publik atau pengawas sebagai *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Sementara itu, menurut *Stewardship theory* pemanfaatan SIPD mencerminkan tanggung jawab aparatur dalam menghasilkan laporan yang akurat dan dapat dipercaya (Davis *et al.*, 1997)

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan mutu laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian (Fitriasari, 2024) menunjukkan bahwa penerapan SIPD mampu meningkatkan ketepatan waktu, akurasi, dan keandalan laporan keuangan melalui sistem yang terotomatisasi serta terintegrasi antar perangkat daerah. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Wahyudi *et al.*, (2024) yang menegaskan bahwa penggunaan SIPD mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas publik melalui peningkatan akses terhadap informasi keuangan daerah. Oleh karena itu, semakin optimal penerapan SIPD dalam pemerintah, maka semakin meningkat juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan hipotesis:

H1: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.2 H2 : Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Internal (SPI) berperan penting dalam memastikan proses pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan aman, tepat dan andal, karena struktur pengawasannya yang memastikan setiap aktivitas organisasi berjalan sesuai ketentuan dan tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan perspektif *Stewardship theory*, SPI mencerminkan komitmen aparatur dalam mengelola keuangan publik secara akurat dan transparan sebagai bentuk tanggungjawab moral (Davis *et al.*, 1997). Sementara itu *Agency Theory*, SPI menjadi sarana untuk meminimalkan informasi asimetri antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*, sehingga mampu menurunkan *Agency cost* dan menjaga kepatuhan pelaporan terhadap aturan yang berlaku (Jensen & Meckling, 1976).

Berdasarkan temuan empiris dalam penelitian Mukarromah, (2021) yang menegaskan bahwa SPI yang berjalan efektif meningkatkan keandalan laporan keuangan daerah. Selain itu penelitian (Rahmawati *et al.*, 2022) yang menunjukkan bahwa penerapan SPI yang kuat berdampak positif pada kualitas laporan melalui proses pemeriksaan dan pengawasan yang konsisten. Dan dalam penelitian (Maspaitella & Mokodompit, 2022) menemukan bahwa kelemahan SPI sering menjadi sumber temuan BPK terkait kesalahan pencatatan dan ketidakpatuhan. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan hipotesis:

H2 : Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.3 H3 : Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Good Governance berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan pengelolaan keuangan daerah sehingga kualitas laporan keuangan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Berdasarkan *Stewardship theory*, aparatur pemerintah sebagai *steward* yang

berkewajiban menjalankan Amanah publik melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan (Davis *et al.*, 1997). Sementara *Agency Theory* menegaskan bahwa *Good Governance* mampu mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *agent* melalui pengawasan, keterbukaan informasi, dan kontrol yang efektif (Jensen & Meckling, 1976).

Berdasarkan temuan empiris dalam penelitian Ardiansyah *et al.*, (2025) membuktikan bahwa praktik tata kelola yang baik meningkatkan kualitas laporan keuangan, terutama melalui transparansi dan kepatuhan hukum. Sementara itu penelitian Khadijah & Juniarti, (2025) menunjukkan bahwa *Good Governance* membantu memperbaiki integritas dan relevansi laporan keuangan pemerintah daerah. Dan temuan (Ardianti, 2018) menegaskan bahwa tata kelola yang baik meminimalkan potensi manipulasi data serta meningkatkan keandalan pelaporan. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan hipotesis:

H3 : *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4.4 H4 : Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan andal karena pengelolaan informasi keuangan pemerintah daerah menuntut kemampuan teknis, integritas, serta pemahaman yang kuat terhadap standar akuntansi pemerintah (SAP). Berdasarkan *Stewardship theory* aparatur yang kompeten dan berintegritas mampu menjalankan tanggungjawab publik melalui penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akurat (Davis *et al.*, 1997). Berdasarkan temuan empiris dalam penelitian Mediaty *et al.*, (2025) yang membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor utama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan dalam penelitian Mustaqmah & Putri, (2022) menunjukkan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah dan kemampuan menggunakan SIPD berkontribusi terhadap ketepatanwaktuan serta keandalan laporan. Dan dalam penelitian (Philadelphphia *et al.*, 2020)

menegaskan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme pegawai memiliki pengaruh penting terhadap ketepatan pelaporan. Berdasarkan temuan tersebut, dirumuskan hipotesis:

H4 : Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *eksplanatori*, karena bertujuan menguji hubungan kausal antara variabel sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), sistem pengendalian internal (SPI), *Good Governance*, dan kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Metode kuantitatif berdasarkan pada paradigma positivistik yang menilai fenomena dapat diukur secara objektif melalui data numerik serta dianalisis menggunakan teknik statistik (Sugiono, 2020). Melalui pengukuran variabel terstruktur dengan skala likert, metode ini memungkinkan pengujian hipotesis secara sistematis dan menghasilkan temuan yang objektif serta dapat digeneralisasikan. Penggunaan pendekatan *eksplanatori* dipilih karena untuk menjelaskan pengaruh antarvariabel dan sekaligus memberikan bukti empiris mengenai fakto-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti efektivitas penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), kekuatan sistem pengendalian internal (SPI), prinsip tata kelola yang baik, serta kualitas sumber daya manusia (Hardani *et al.*, 2020). Proses analisis dilakukan dengan menggunakan *structural equation modelling partial least square* (SEM PLS) untuk menilai hubungan antarvariabel laten secara menyeluruh dan sesuai dengan karakteristik

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pemerintah Kota Probolinggo, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Lokasi ini dipilih karena pemerintah daerah kota probolinggo telah mengimplementasikan SIPD sesuai Permendagri No.77 Tahun 2019 dan masih menghadapi beberapa kendala teknis serta kebutuhan peningkatan kualitas SDM, sebagaimana yang tercatat dalam laporan keuangan daerah dan temuan penelitian sebelumnya.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek atau subyek yang memiliki karakteristik serta jumlah tertentu yang telah ditetapkan peneliti sebagai fokus utama penelitian, dengan tujuan untuk menganalisis dan diambil kesimpulannya (Sugiono, 2020). Secara umum, populasi mencakup seluruh objek yang menjadi fokus penelitian, baik individu maupun lembaga, yang menjadi dasar penentuan sampel. Populasi dalam penelitian ini, mencakup seluruh aparatur sipil negara (ASN) pada OPD badan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah (BPPKAD) badan pemerintah daerah kota probolinggo. BPPKAD dipilih sebagai populasi penelitian karena memiliki peran utama dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, ASN pada BPPKAD dianggap paling relevan dan representatif dalam menggambarkan penerapan SIPD, SPIP, *Good Governance*, serta Kualitas SDM yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk menggambarkan karakteristik populasi secara keseluruhan sehingga hasil penelitian dapat meminimalkan kesalahan pengambilan sampel (*sampling error*) (Sugiono, 2020). Teknik pengambilan sampel yang tepat akan meningkatkan akurasi hasil dan memperkuat validitas penelitian.

Menurut Hair *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa ukuran sampel ideal dalam penelitian berbasis *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* berkisar antara 100 hingga 200 responden, dan dapat disesuaikan dengan jumlah indikator yang digunakan pada kuesioner dengan asumsi 5-10 kali jumlah indikator yang ada. Pada penelitian ini

jumlah indikator yang digunakan ada sebanyak 23 indikator. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan rumus Hair sebagai berikut:

$$N = (5-10 \times \text{Jumlah Indikator})$$

- 5 x 23 sampai 10 x 23
- 5 x 23 = 115 sampai 10 x 23 = 230

Berdasarkan perhitungan diatas, batas minimum jumlah sampel 115 sampai dengan maksimum 230 sampel. Dengan mempertimbangkan jumlah ASN yang aktif di BPPKAD, ketersediaan waktu, serta efisiensi penelitian, maka peneliti menetapkan jumlah sampel sebanyak 122 responden. Jumlah tersebut dianggap ideal karena memenuhi rekomendasi Hair *et al.*, (2020) bahwa ukuran sampel di atas 100 sudah cukup untuk menghasilkan estimasi model SEM-PLS yang stabil dengan tingkat kompleksitas sedang hingga tinggi.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan probability sampling melalui pendekatan simple random sampling. Pendekatan tersebut memungkinkan setiap individu yang termasuk dalam populasi memiliki peluang yang setara untuk dipilih sebagai responden, tanpa mempertimbangkan perbedaan posisi, jabatan, maupun tingkatan tertentu. Pemilihan teknik ini didasarkan pada keseragaman tugas ASN di BPPKAD dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan SIPD, sehingga seluruh responden memiliki peluang yang setara untuk mewakili populasi penelitian.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode simple random sampling. Menurut Sugiono, (2020), sample random sampling merupakan teknik penentuan sampel dimana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih tanpa melihat perbedaan karakteristik secara individual. Teknik ini digunakan dalam penelitian kuantitatif karena mampu menghasilkan sampel yang representative sesuai dengan kondisi populasi.

(Hardani *et al.*, 2020) menjelaskan bahwa simple random sampling tepat digunakan ketika populasi memiliki karakteristik yang hampir sama, sehingga responden dapat dipilih secara acak tanpa memengaruhi hasil. Metode ini juga membantu meningkatkan ketepatan analisis statistik karena proses pemilihan sampelnya dilakukan secara objektif.

3.5 Data dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti untuk menjawab rumusan masalah secara objektif. Menurut Sugiono, (2020), data dapat berupa angka, simbol, atau deksripsi yang dikumpulkan secara sistematis sesuai tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari responden. Proses pengumpulan data dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga, sehingga data yang terkumpul mencerminkan informasi asli dari sumbernya (Hardani *et al.*, 2020). Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terstruktur yang berbasis *google form* yang ditujukan kepada aparat pemerintah daerah dan organisasi pemerintah daerah kota probolinggo. Penyebaran keusioner menggunakan *skala likert* 1-5 untuk menghasilkan skor kuantitatif sesuai inikator variabel. Pemilihan data primer dilakukan karena dianggap mampu menggambarkan kondisi aktual di masing-masing organisasi pemerintah daerah serta mendukung analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden sebagai sumber utama data primer. Menurut Sugiono 2020, kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara menyampaikan serangkaian pertanyaan atau pernyataan dalam bentuk tertulis kepada responden untuk memperoleh jawaban sesuai dengan kondisi yang mereka alami. Instrument kuesioner disusun menggunakan *skala likert* 1-5, dimana nilai “1” menunjukkan ketidakpastian yang sangat rendah dan nilai “5” menunjukkan tingkat persetujuan yang sangat tinggi terhadap pernyataan terkait variabel

SIPD, SPI, *Good Governance*, Kualitas SDM, dan Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyebaran kuesioner dilakukan secara online melalui *google form*, yang disebarakan melalui WhatsApp, *e-mail*, serta pesan pribadi kepada aparaturn pemerintah kota probolinggo. Penggunaan penyebaran kuesioner ini dipilih karena penelitian ini bersifat kuantitatif, membutuhkan data numerik yang terukur, dan memungkinkan peneliti memperoleh informasi langsung dari responden secara cepat dan efisien. Sebelum pengisian kuesioner, peneliti meminta persetujuan dahulu kepada responden serta menjelaskan bahwa data yang diberikan hanya digunakan untuk tujuan akademik dan identitas responden akan tetap dirahasiakan.

3.7 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel penelitian diukur dengan menentukan definisi operasionalnya, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam pengukuran. Dalam penelitian ini, terdapat 5 variabel, yaitu sbb:

1. Variabel X1 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang dilakukan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara konseptual dapat dipahami sebagai suatu platform terintegrasi yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam mengelola proses perencanaan, penyusunan anggaran, hingga penyajian laporan keuangan secara digital. Penerapan sistem ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang andal, tersedia secara tepat waktu, serta memiliki tingkat akuntabilitas yang tinggi sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik (Fitriani & Solikhin, 2024). Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah (Delone & McLean, 2016). Adapun indikator pada variabel ini yaitu:

- a. Kualitas Sistem
- b. Kualitas Informasi
- c. Kualitas Pelayanan
- d. Intensitas pengguna

- e. Kepuasan pengguna
- f. Manfaat bersih

Skala pengukuran dalam penelitian ini adalah skala likert dan responden diminta untuk memilih diantara lima jawaban dengan masing-masing kriteria bobot 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju.

2. Variabel X2 Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Secara konseptual, sistem pengendalian internal (SPI) adalah proses integral yang diterapkan oleh pemimpin dan seluruh aparatur pemerintah untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan (Hanif *et al.*, 2023). SPI yang kuat akan membantu mencegah kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan (Ridzal *et al.*, 2022). Adapun indikator variabel penelitian ini yaitu:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Risiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pemantauan

Skala pengukuran dalam penelitian ini adalah skala likert dan responden diminta untuk memilih diantara lima jawaban dengan masing-masing kriteria bobot 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju.

3. Variabel X3 *Good Governance*

Secara konseptual, *Good Governance* adalah tata kelola pemerintah yang menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan kepatuhan terhadap hukum (supremasi hukum) guna mewujudkan pemerintah yang bersih, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan (Karso, 2022) dan (Ardiansyah *et al.*, 2025). Adapun indikator variabel penelitian ini yaitu:

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. Partisipasi
- d. Efektivitas dan Efisiensi
- e. Kepatuhan Hukum

Skala pengukuran dalam penelitian ini adalah skala likert dan responden diminta untuk memilih diantara lima jawaban dengan masing-masing kriteria bobot 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju.

4. Variabel X4 Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara konseptual, kualitas sumber daya manusia (SDM) adalah, kemampuan, kompetensi, dan keahlian aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan secara professional (Mediaty *et al.*, 2025). SDM yang kompeten akan meningkatkan ketepatan penyusunan, pelaporan, dan penggunaan sistem informasi keuangan (Yenni *et al.*, 2024). Adapun indikator variabel penelitian ini yaitu:

- a. Pengetahuan
- b. Keterampilan
- c. Kemampuan

Skala pengukuran dalam penelitian ini adalah skala likert dan responden diminta untuk memilih diantara lima jawaban dengan masing-masing kriteria bobot 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju.

5. Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara konseptual, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sejauh mana laporan keuangan pemerintah mampu menyajikan informasi yang relevan, terpercaya, dapat dibandingkan dan mudah dipahami oleh pengguna laporan (Yenni *et al.*, 2024). Kualitas laporan keuangan yang baik menjadi indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah serta mencerminkan tata

kelola pemerintahan yang akuntabel (Rahmawati *et al.*, 2022). Adapun variabel penelitian ini yaitu:

- a. Relevansi
- b. Terpercaya
- c. Dapat Dibandingkan
- d. Dapat Dipahami

Skala pengukuran dalam penelitian ini adalah skala likert dan responden diminta untuk memilih diantara lima jawaban dengan masing-masing kriteria bobot 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 = Setuju, 5 = Sangat Setuju.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel Penelitian	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (X1)	1. Kualitas Sistem 2. Kualitas Informasi 3. Kualitas Pelayanan 4. Intensitas pengguna 5. Kepuasan pengguna 6. Manfaat bersih	Skala likert 1-5	(Delone & McLean, 2016)
Sistem Pengendalian Internal (SPI) (X2)	1. Lingkupangan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi & komunikasi 5. Pemantauan	Skala likert 1-5	(Rahmawati <i>et al.</i> , 2022)
<i>Good Govenrnance</i> (X3)	1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Partisipasi	Skala likert 1-5	(Khadijah & Juniarti, 2025)

Variabel Penelitian	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber
	4. Efektivitas & Efisiensi 5. Kepatuhan hukum		
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (X4)	1. Pengetahuan 2. Keterampilan 3. Kemampuan	Skala likert 1-5	(Yenni <i>et al.</i> , 2024)
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	1. Relevansi 2. Terpercaya 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	Skala likert 1-5	(Yenni <i>et al.</i> , 2024)

3.8 Analisis Data

Analisis data melibatkan pengolahan data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami oleh pembaca penelitian dan dapat digunakan dalam penarikan kesimpulan penelitian. Sebelum mengambil keputusan, data yang telah dikumpulkan perlu diolah dan dianalisis agar menghasilkan informasi yang bermanfaat. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Partial Least Square* (PLS), yaitu metode penyelesaian *structural equation modelling* (SEM). Proses pengolahan data dilakukan menggunakan *software SmartPLS* melalui tahapan yang telah ditetapkan sebagai berikut:

a. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran (*outer model*) menjelaskan keterkaitan antara indikator dengan variabel laten. Model pengukuran ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrument penelitian benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur serta memiliki konsistensi yang baik. Uji validitas digunakan untuk melihat ketepatan indikator dalam menggambarkan variabel, sedangkan uji reliabilitas menilai kestabilan jawaban responden terhadap setiap item pertanyaan dalam kuesioner atau instrument penelitian. Uji yang dilakukan pada *outer model* meliputi:

- 1) *Convergent Validity* (Validitas Konvergen)

Pengukuran validitas konvergen digunakan untuk menilai sejauh mana indikator-indikator secara signifikan mencerminkan variabel laten yang diukur. Untuk menilai validitas konvergen dapat dilihat dari nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dan *outer loading*. Dimana $AVE \geq 0,5$ dan *outer loading* $> 0,7$ maka menunjukkan bahwa indikator pada variabel penelitian adalah valid. Meskipun begitu, pada tahap awal pengembangan model, indikator dengan *loading factor* 0,50-0,60 masih dapat diterima karena tetap berkontribusi terhadap konstruk yang diukur, meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan indikator dengan *loading* $> 0,7$ (Setiabudhi *et al.*, 2024)

2) *Discriminant Validity* (Validitas Diskriminan)

Validitas diskriminan menunjukkan sejauh mana suatu variabel laten atau konstruk benar-benar berbeda dengan konstruk lainnya, sehingga indikator lebih mencerminkan variabel itu sendiri daripada variabel lain. Untuk menilai validitas diskriminan dapat diperhatikan melalui *square root of average variance extracted* (AVE), dimana variabel dianggap valid jika nilai akar AVE lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan variabel lain. Hal ini memastikan setiap variabel diukur secara spesifik dan instrument penelitian dapat diandalkan (Setiabudhi *et al.*, 2024)s

3) Uji Reabilitas

Uji reliabilitas mengukur tingkat keandalan suatu instrument dalam mengukur variabel laten. Evaluasi *composite reliability* dilakukan dengan melihat nilai Composite Reliability atau Cronbach's Alpha (Setiabudhi *et al.*, 2024). Konstruk akan dinyatakan reliabel apabila nilai dari composite reliability di atas 0,70 dan nilai dari cronbach's alpha di atas 0,70 (Sihombing & Arsani, 2024) Semakin tinggi nilai dari Composite Reliability, maka semakin tinggi pula reliabilitas konstruk tersebut. Nilai Composite Reliability sebesar 0,60–0,70 masih dapat diterima dalam penelitian

eksploratif, sementara nilai antara 0,70–0,90 dianggap ideal untuk penelitian lanjutan.

b. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Model struktural atau *inner model* menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori yang mendasarinya. Dalam pendekatan *Partial Least Square* (PLS), evaluasi *inner model* dilakukan melalui beberapa komponen berikut:

1. *R-Square* (R^2) :

R-Square adalah koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa besar variabel independent dapat menjelaskan variabel endogen dalam suatu model. Secara umum, nilai *R-Square* sebesar 0,67 dikategorikan kuat, 0,33 termasuk sedang, dan 0,19 dianggap lemah (Sihombing & Arsani, 2024). Perubahan nilai *R-Square* dapat digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independent memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam model yang dianalisis.

2. *Q-Square* (Q^2)

Uji *Q-Square* bertujuan guna menilai seberapa baik model dapat memprediksi nilai observasi dan estimasi parameter. Apabila nilai *Q-Square* dapat lebih besar dari 0, maka model memiliki *predictive relevance*. Sebaliknya, jika nilai *Q-Square* kurang dari 0, maka model dianggap tidak memiliki kemampuan prediktif yang memadai. Dengan demikian, nilai *Q-Square* diatas 0 menunjukkan bahwa model layak dikategorikan memiliki relevansi prediktif (Sihombing & Arsani, 2024).

3. *F-Square*

Uji *F-Square* bertujuan guna menilai seberapa baik kualitas suatu model. Nilai *f-square* yang melebihi 0,15 menunjukkan bahwa model tersebut berada dalam kategori cukup baik atau minimal berada pada tingkat moderat (Sihombing & Arsani, 2024)

c. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menilai arah dan kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode ini untuk memeriksa tingkat signifikan *P-value* untuk menilai dampak variabel-variabel sesuai hipotesis penelitian. Proses pengajuan hipotesis dilakukan melalui analisis jalur (*path coefficient*) dari model SEM-PLS yang telah dibangun. Dalam penelitian ini, digunakan *P-value* 0,05 atau sama dengan signifikan level 5% sebagai kriteria pengujian.

- Apabila $t\text{-hitung} > t\text{ tabel}$ yaitu lebih dari 1,96 dan signifikansi *p-value* $< 0,05$ maka hipotesis diterima
- Apabila $t\text{-hitung} < t\text{ tabel}$ yaitu kurang dari 1,96 dan signifikansi *p-value* $> 0,05$ maka hipotesis ditolak

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Probolinggo merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Timur yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa dan transportasi di kawasan pantai utara bagian timur. Letak geografis Kota Probolinggo yang berada pada jalur penghubung antar wilayah menjadikan kota ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, Kota Probolinggo juga memiliki perkembangan yang cukup pesat pada sektor perdagangan, industri kecil menengah, jasa publik, serta pembangunan infrastruktur daerah. Sebagai daerah yang terus berkembang, Pemerintah Kota Probolinggo dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam menjalankan tugas pemerintah, pemerintah daerah dibantu oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki fungsi masing-masing, baik dalam bidang pelayanan masyarakat maupun pengelolaan administrasi pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai objek penelitian, Pemerintah Kota Probolinggo dipilih karena memiliki komitmen yang cukup baik dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, yang dibuktikan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, pemerintah daerah masih menghadapi beberapa tantangan, seperti penyesuaian sistem digital, peningkatan kompetensi aparatur, penguatan pengendalian internal, serta optimalisasi penerapan prinsip *Good Governance*. Dalam mendukung pengelolaan keuangan yang *modern*, Pemerintah Kota Probolinggo telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem terintegrasi untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, Kota Probolinggo menjadi objek yang

relevan dalam penelitian ini karena mampu menggambarkan kondisi nyata bagaimana penerapan SIPD, SPI, *Good Governance*, dan Kualitas SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

4.1.2 Deskripsi Responden

Responden dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik pegawai yang menjadi sampel penelitian pada Pemerintah Kota Probolinggo. Responden yang dipilih merupakan aparatur yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah, penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, serta penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Jumlah kuesioner yang berhasil dikumpulkan dan dapat diolah dalam penelitian ini sebanyak 122 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini melalui pengisian kuesioner terstruktur yang disebarakan menggunakan Google Form. Data yang terkumpul telah melalui proses verifikasi untuk memastikan validitasnya sebelum dianalisis. Untuk memahami karakteristik sampel, profil responden dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, usia, nama organisasi pemerintahan, lama/masa kerja.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik jenis kelamin responden disajikan guna memperlihatkan sejauh mana pegawai laki-laki dan perempuan terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan administrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	54	44,3%
Perempuan	68	55,7%
Total	122	100%

Sumber : Output SmartPLS (data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa responden perempuan lebih mendominasi dibandingkan responden laki-laki. Jumlah responden laki-laki sebanyak 54 orang atau sebesar 44,3%, sedangkan responden perempuan berjumlah 68 orang atau sebesar 55,7%. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah perempuan, yang berarti keterlibatan pegawai perempuan dalam pengelolaan keuangan daerah dan administrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo cukup besar.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik usia responden disajikan guna memperlihatkan rentang umur pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan administrasi pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kota Probolinggo. Pengelompokan usia responden penting dilakukan karena usia dapat mencerminkan tingkat kedewasaan, pengalaman kerja, serta kemampuan pegawai dalam memahami tugas dan tanggungjawab yang dijalankan. Adapun pengelompokan responden berdasarkan usia dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
≤ 30 Tahun	9	7,4%
31- 40 Tahun	37	30,3%
41-50 Tahun	63	51,6%
>50 Tahun	13	10,7%
Total	122	100%

Sumber : Output SmartPLS (data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa responden paling banyak pada rentang usia 41–50 tahun, yaitu sebanyak 63 orang atau sebesar 51,6%. Selanjutnya responden usia 31–40 tahun berjumlah 37 orang atau 30,3%, responden usia di atas 50 tahun sebanyak 13 orang atau 10,7%, sedangkan responden dengan usia ≤ 30 tahun berjumlah 9 orang atau 7,4%. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada usia produktif dan

matang dalam bekerja, sehingga dinilai telah memiliki pengalaman serta pemahaman yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Nama Organisasi Pemerintahan

Karakteristik nama organisasi pemerintahan responden disajikan guna memperlihatkan asal instansi atau organisasi perangkat daerah (OPD) tempat responden bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Pengelompokan ini dilakukan untuk mengetahui sebaran responden dari berbagai instansi pemerintahan sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi yang lebih menyeluruh. Adapun pengelompokan responden berdasarkan nama organisasi pemerintahan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Nama Organisasi Pemerintahan

Nama Organisasi	Jumlah	Persentase
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	18	14,80%
Inspektorat Daerah Kota Probolinggo	10	8,20%
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang)	9	7,40%
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15	12,30%
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	9,80%
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR)	11	9,00%
Dinas Perhubungan	8	6,60%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	7,40%
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	5,70%
Sekretariat Daerah / OPD Lainnya	23	18,80%
Total	122	100%

Sumber : Output SmartPLS (data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa responden paling banyak berasal dari Sekretariat Daerah / OPD lainnya sebanyak 23 orang atau sebesar 18,8%. Selanjutnya responden berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebanyak 18 orang atau 14,8%, Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 15 orang atau 12,3%, serta Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 12 orang atau 9,8%. Sementara itu, jumlah responden paling sedikit berasal dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 7 orang atau 5,7%. Temuan ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian telah berasal dari berbagai organisasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya mewakili satu instansi tertentu, tetapi mencerminkan kondisi pengelolaan keuangan daerah secara lebih luas dan komprehensif pada berbagai perangkat daerah.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama/Masa Kerja

Karakteristik lama/masa kerja responden disajikan guna memperlihatkan tingkat pengalaman pegawai dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya dalam bidang administrasi dan pengelolaan keuangan daerah. Semakin lama masa kerja pegawai, maka semakin besar kemungkinan pegawai memahami prosedur kerja, sistem keuangan, dan kebijakan pemerintahan daerah. Adapun pengelompokan responden berdasarkan lama masa kerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama/Masa Kerja

Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1-5 Tahun	18	14,8%
6 – 10 Tahun	12	9,8%
11 – 20 Tahun	65	53,3%
>20 Tahun	27	22,1%
Total	122	100%

Sumber : Output SmartPLS (data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat bahwa responden paling banyak memiliki masa kerja 11-20 tahun, yaitu sebanyak 65 orang atau sebesar 53,3%. Selanjutnya responden dengan masa kerja di atas 20 tahun berjumlah 27 orang atau 22,1%, responden masa kerja 1–5 tahun sebanyak 18 orang atau 14,8%, sedangkan masa kerja 6–10 tahun berjumlah 12 orang atau 9,8%. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden merupakan pegawai yang telah berpengalaman cukup lama, sehingga

memiliki pemahaman yang baik terhadap sistem kerja, administrasi, dan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

4.1.3 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal data yang diamati dan untuk mendeskripsikan menggunakan nilai *mean* (M), median (Me), modus (Mo) dan standar deviasi (SD) dari setiap variabel. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden dan kondisi data penelitian yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai pada Badan Pemerintah Kota Probolinggo. Berikut ini disajikan hasil statistik deskriptif dari seluruh indikator yang digunakan dalam penelitian:

Tabel 4. 5 Hasil Statistik Deskriptif

Nama	Mean	Median	Min yang diamati	Maks yang diamati	Standar Deviasi
SIPD1	4.377	4.000	3.000	5.000	0.501
SIPD2	4.230	4.000	2.000	5.000	0.598
SIPD3	4.303	4.000	2.000	5.000	0.542
SIPD4	4.254	4.000	3.000	5.000	0.489
SIPD5	4.156	4.000	3.000	5.000	0.512
SIPD6	4.344	4.000	3.000	5.000	0.540
SPI1	4.303	4.000	3.000	5.000	0.494
SPI2	4.270	4.000	3.000	5.000	0.496
SPI3	4.254	4.000	3.000	5.000	0.472
SPI4	4.279	4.000	3.000	5.000	0.484
SPI5	4.328	4.000	2.000	5.000	0.519
GG1	4.303	4.000	3.000	5.000	0.510
GG2	4.303	4.000	3.000	5.000	0.477
GG3	4.230	4.000	3.000	5.000	0.458
GG4	4.246	4.000	3.000	5.000	0.484
GG5	4.295	4.000	4.000	5.000	0.456
KSDM1	4.344	4.000	4.000	5.000	0.475
KSDM2	4.279	4.000	3.000	5.000	0.484
KSDM3	4.303	4.000	4.000	5.000	0.460
KLK1	4.369	4.000	4.000	5.000	0.482
KLK2	4.344	4.000	3.000	5.000	0.508
KLK3	4.328	4.000	3.000	5.000	0.487
KLK4	4.311	4.000	4.000	5.000	0.463

Berdasarkan hasil olah data pada tabel 4.5, diketahui bahwa seluruh indikator penelitian berasal dari 122 data responden yang teliti. Variabel sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) menunjukkan nilai rata-rata yang berada pada kisara 4,156 sampai 4,377. Nilai minimum berada antara 2,000 sampai 3,000 dan nilai maksimum sebesar 5,000. Selain itu, standar deviasi berada pada rentang 0,489 sampai 0,598. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan penilaian baik terhadap penerapan SIPD, dengan tingkat variasi jawaban yang relatif rendah.

Variabel sistem pengendalian internal (SPI) menunjukkan nilai minimum sebesar 2,000 dan nilai maksimum sebesar 5,000, dengan rata-rata antara 4,254 sampai 4,328. Selain itu, standar deviasi berada pada kisaran 0,472 sampai 0,519. Hal ini menunjukkan bahwa responden menilai sistem pengendalian internal telah berjalan dengan baik dan jawaban responden relatif konsisten.

Variabel *Good Governance* (GG) menunjukkan nilai minimum sebesar 3,000 dan nilai maksimum sebesar 5,000, dengan nilai rata-rata antara 4,230 sampai 4,303. Selain itu, standar deviasi tercatat sebesar 0,458 sampai 0,510. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik dinilai positif oleh responden, serta memiliki penyebaran data yang cukup merata.

Variabel kualitas sumber daya manusia (KSDM) menunjukkan nilai minimum sebesar 3,000 sampai 4,000 dan nilai maksimum sebesar 5,000, dengan nilai rata-rata antara 4,279 sampai 4,344. Selain itu, standar deviasi berada pada rentang 0,460 sampai 0,484. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam instansi dinilai baik, baik dari segi kompetensi maupun kemampuan kerja pegawai.

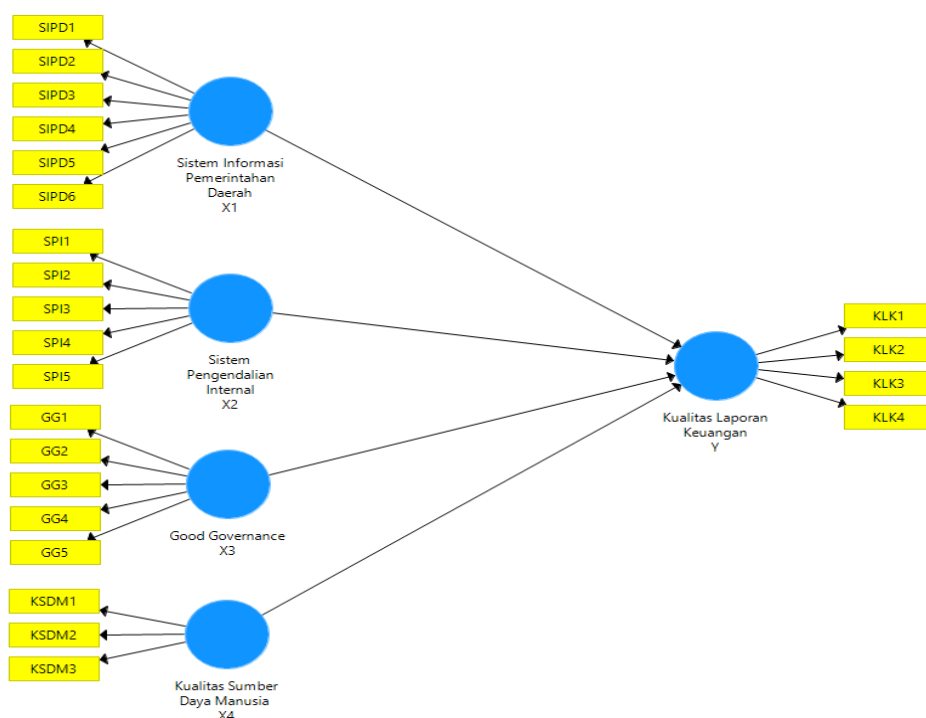
Variabel kualitas laporan keuangan (KLK) menunjukkan nilai minimum sebesar 3,000 sampai 4,000 dan nilai maksimum sebesar 5,000, dengan nilai rata-rata antara 4,322 sampai 4,369. Selain itu, standar deviasi berada pada kisaran 0,463 sampai 0,508. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dinilai baik oleh responden, serta memiliki tingkat konsistensi jawaban yang cukup tinggi.

Secara keseluruhan, seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata diatas 4.000. Hal ini menunjukkan bahwa responden memberikan persepsi positif terhadap setiap variabel yang diteliti, sedangkan nilai standar deviasi yang relative kecil menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung homogen atau tidak terlalu bervariasi.

4.1.4 Skema Model Partial Least Square (PLS)

Metode *Partial Least Square* (PLS) merupakan salah satu pendekatan dalam analisis statistic multivariant yang berfungsi untuk menelaah keterkaitan antara variabel laten (konstruk) dengan indikator-indikator penyusunnya secara simultan. Dalam studi ini, pengujian hipotesis dilakukan melalui teknik analisis *Partial Least Square* (PLS) yang di proses menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Dibawah ini ditampilkan rancangan model PLS yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

Gambar 4. 1 Skema Model Partial Least Square



Sumber : Output SmartPLS (data diolah, 2026)

4.1.5 Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

1. *Convergent Validity*

Convergent Validity dapat diukur dengan melihat nilai *outer loading* dan *Average Variance Extrated* (AVE). Secara konvergen jika nilai *outer loading*-nya lebih dari 0,7 dan nilai AVE-nya diatas 0,5 akan dianggap valid (Hussein, 2015). Namun, dalam penelitian awal atau tahap pengembangan instrument, nilai *loading factor* antara 0,50 hingga 0,60 masih dapat diterima. Hasil *Outer Loadings* yang diterapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 6 Hasil uji *Outer Loading*

	GG	KLK	KSDM	SIPD	SPI
GG1	0.865				
GG2	0.936				
GG3	0.874				
GG4	0.881				
GG5	0.923				
KLK1		0.926			
KLK2		0.868			
KLK3		0.899			
KLK4		0.906			
KSDM1			0.914		
KSDM2			0.957		
KSDM3			0.959		
SIPD1				0.802	
SIPD2				0.817	
SIPD3				0.794	
SIPD4				0.642	
SIPD5				0.744	
SIPD6				0.850	
SPI1					0.862
SPI2					0.915
SPI3					0.916
SPI4					0.886
SPI5					0.796

Sumber : Output SmartPLS (data diolah, 2026)

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa skor outer loading tiap variable telah memenuhi kriteria minimum 0,50 yang mengindikasikan bahwa setiap indikator telah dinyatakan sesuai. Namun demikian, terdapat satu indikator yaitu SIPD4 yang memiliki nilai *outer loading* sebesar 0,642, yang berada dibawah nilai ideal 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa indikator SIPD4 memiliki kontribusi yang relatif lebih rendah dalam merepresentasikan variabel SIPD dibandingkan indikator lainnya, yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan pemahaman responden atau kurang kuatnya keterkaitan indikator tersebut dengan konstruk yang diukur.

Meskipun demikian, nilai tersebut masih berada di atas minimum 0,50 dan didukung oleh nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang telah memenuhi kriteria, sehingga indikator SIPD4 tetap dinyatakan valid dan dapat dipertahankan dalam model penelitian.

Tabel 4. 7 Hasil Uji *Average Variance Extracted* (AVE)

	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
<i>Good Governance</i>	0.803
Kualitas Laporan Keuangan	0.810
Kualitas Sumber Daya Manusia	0.890
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	0.605
Sistem Pengendalian Internal	0.767

Sumber : Output SmartPLS (data diolah, 2026)

Pada tabel 4.7 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *Good Governance*, Kualitas Laporan Keuangan, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Ssitem Pengendalian Internal menunjukkan nilai AVE diatas 0,5. Nilai tersebut menunjukkan bahwa para indikator yang mengukur variable tersebut dinyatakan valid.

2. *Discriminant validity*

Salah satu metode untuk mengevaluasi validitas adalah melalui analisis nilai *Cross Loading*, yang berfungsi untuk menilai apakah suatu konstruk memiliki validitas diskriminan yang memadai. Validitas diskriminan dianggap tercapai apabila nilai loading suatu indikator konstruk yang diukur lebih tinggi

dibandingkan nilai loading indikator tersebut terhadap konstruk lainnya (Sihombing & Arsani, 2024).

Tabel 4. 8 Cross Loading

	GG	KLK	KSDM	SIPD	SPI
GG1	0.865	0.765	0.670	0.677	0.771
GG2	0.936	0.799	0.691	0.684	0.745
GG3	0.874	0.708	0.591	0.676	0.725
GG4	0.881	0.704	0.636	0.669	0.670
GG5	0.923	0.759	0.681	0.724	0.709
KLK1	0.755	0.926	0.791	0.550	0.659
KLK2	0.695	0.868	0.665	0.525	0.687
KLK3	0.750	0.899	0.719	0.478	0.619
KLK4	0.802	0.906	0.751	0.532	0.674
KSDM1	0.640	0.746	0.914	0.543	0.609
KSDM2	0.699	0.761	0.957	0.558	0.610
KSDM3	0.727	0.797	0.959	0.559	0.614
SIPD1	0.541	0.422	0.469	0.802	0.602
SIPD2	0.541	0.348	0.359	0.817	0.562
SIPD3	0.596	0.415	0.460	0.794	0.583
SIPD4	0.561	0.435	0.430	0.642	0.459
SIPD5	0.522	0.339	0.411	0.744	0.585
SIPD6	0.733	0.626	0.547	0.850	0.726
SPI1	0.613	0.578	0.518	0.715	0.862
SPI2	0.722	0.605	0.548	0.674	0.915
SPI3	0.776	0.678	0.588	0.731	0.916
SPI4	0.755	0.689	0.614	0.714	0.886
SPI5	0.657	0.640	0.555	0.513	0.796

Sumber : Output SmartPLS (data diolah, 2026)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, hasil uji *Cross Loading* menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki loading yang paling tinggi terhadap konstruk yang diharapkan untuk diukurnya. Hal ini berarti bahwa masing-masing indikator dalam model telah mampu membedakan konstruksya dari konstruk lain dalam model, serta memiliki keunikan dalam mengukur variabel yang dimaksud.

3. Uji Reliabilitas

Composite Reliability mengukur tingkat keandalan suatu instrument dalam mengukur variable laten. Evaluasi *composite reliability* dilakukan dengan melihat nilai *Composite Reliability* atau *Cronbach's Alpha*. Konstruk dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *composite reliability* di atas 0,70 dan

cronbach's alpha di atas 0,70 (Sihombing & Arsani, 2024). Semakin tinggi nilai *Composite Reliability*, semakin tinggi pula reliabilitas konstruk tersebut. Nilai *Composite Reliability* sebesar 0,60–0,70 masih dapat diterima dalam penelitian eksploratif, sementara nilai antara 0,70–0,90 dianggap ideal untuk penelitian lanjutan.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_c)
<i>Good Governance</i>	0.939	0.953
Kualitas Laporan Keuangan	0.922	0.945
Kualitas Sumber Daya Manusia	0.938	0.960
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	0.869	0.901
Sistem Pengendalian Internal	0.923	0.943

Sumber : Output SmartPLS (data diolah, 2026)

Setelah melihat tabel 4.9 dapat dilihat bahwa *cronbach's alpha* dan *composite reliability* pada variabel *Good Governance*, kualitas laporan keuangan, kualitas sumber daya manusia, sistem informasi pemerintahan daerah, dan sistem pengendalian internal lebih besar dari 0,7. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa setiap indikator yang mengukur variabel-variabel tersebut telah memenuhi standar pengujian reabilitas.

4.1.6 Pengujian Struktural Model (*Inner Model*)

1. Uji *R-Square* (R^2)

Nilai *R-Square* adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen. Pada umumnya nilai *R square* sebesar 0.67 (kuat), 0.33 (moderat) dan 0.19 (lemat) (Sihombing & Arsani, 2024). Perubahan pada nilai *R-Square* bertujuan untuk mengevaluasi sebuah variabel, apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Berikut adalah hasil pengujian *R-Square* yang telah dianalisis dengan SmartPLS 3.

Tabel 4. 10 Hasil uji R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Kualitas Laporan Keuangan_Y	0.811	0.804

Sumber : Output SmartPLS (data diolah, 2026)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas hasil uji *R-Square* variabel Y sebesar 0.811 yang berarti variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan 81,1% variasi yang terjadi pada variabel dependen, sedangkan 18,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Nilai tersebut menunjukknn bahwa kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen tergolong kuat. Selanjutnya, nilai *Adjusted R- Square* sebesar 0,804 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen, model tetap memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan variabel dependen. Sehingga, model penelitian ini dapat dikatakan baik dan telah memenuhi kriteria yang dapat diandalkan dalam model analisis.

2. Uji Q-Square

Q-Square mengukur seberapa baik nilai obesrvasi yang dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai ini diperoleh melalui proses blindfolding (Teknik resampling), bukan dari hasil perhitungan langsung. Jika nilai Q- square lebih daru 0, maka model memiliki *predictive relevance*. Sebaliknya, jika nilainya kurang dari 0, maka model dianggap tiak memiliki kemampuan prediktif yang memadai. Dengan demikian, nilai Q-square diatas 0 menunjukkan bahwa model layak dikategorikan memiliki relevansi prediktif (Sihombing & Arsani, 2024).

Tabel 4. 11 Hasil Q-Square

	Q² (=1-SSE/SSO)
<i>Good Governance_X3</i>	0.000
Kualitas Laporan Keuangan_Y	0.647
Kualitas Sumber Daya Manusia _X4	0.000
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah_X1	0.000
Sistem Pengendalian Internal_X2	0.000

Sumber : Output SmartPLS (data diolah, 2026)

Q predict variabel kualitas laporan keuangan 0.647 berada pada kisaran 0 hingga 1. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent memiliki kekuatan prediksi yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Uji F-Square

Dalam penelitian kuantitatif, *effect size* membantu menentukan seberapa besar dampak yang dimiliki suatu variabel, bukan hanya apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak. Uji *f-square* (f^2) yang disarankan adalah diatas 0.15 (Sihombing & Arsani, 2024), dimana dengan variabel laten eksogen memiliki pengaruh moderat pada level struktural.

Tabel 4. 12 Hasil Uji F-Square

	GG	KLK	KSDM	SIPD	SPI
<i>Good Governance</i>		0.382			
Kualitas Laporan Keuangan					
Kualitas Sumber Daya Manusia		0.443			
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah		0.111			
Sistem Pengendalian Internal		0.060			

Sumber : Output SmartPLS (data diolah, 2026)

Dalam tabel 4.12 konstruk *Good Governance* (GG) memiliki *effect size* yang moderat terhadap kualitas laporan keuangan (KLK), karena ini nilai f^2 (0.382) berada di atas batas minimal yang disarankan (0.15). Konstruk nilai kualitas sumber daya manusia (KSDM) memiliki *effect size* yang moderat terhadap kualitas laporan keuangan (KLK) , karena nilai f^2 (0.443) berada diatas batas minimal yang disarankan (0.15). Kemudian konstruk sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) memiliki *effect size* yang lemah terhadap kualitas laporan keuangan (KLK), karena nilai f^2 (0.111) berada dibawah batas minimal yang disarankan (0.15). Terakhir, konstruk dari sistem pengendalian internal (SPI) memiliki *effect size* yang lemah terhadap kualitas laporan keuangan (KLK), karena nilai f^2 (0.060) berada dibawah batas minimal yang disarankan (0.15).

4.1.7 Uji Hipotesis

Uji hipotesis untuk menentukan arah hubungan antara variabel yang memengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. *Path coefficients* menggambarkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel, dengan rentang nilai dari -1 hingga +1. Hubungan dikatakan kuat jika nilainya mendekati -1 atau +1, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah. Selain itu, pengujian berikut juga menghasilkan p-value, sehingga variabel independen dianggap berpengaruh pada variabel dependen. Hipotesis dapat diterima apabila skor $p < 0,05$. Berikut ini merupakan hasil uji hipotesis yang dapat dilihat pada tabel 4.13:

Tabel 4. 13 Hasil Uji Hipotesis

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keterangan
X1-> Y	-0.244	-0.231	0.068	3.573	0.000	Diterima
X2 -> Y	0.198	0.195	0.096	2.069	0.039	Diterima
X3 -> Y	0.549	0.547	0.127	4.335	0.000	Diterima
X4 -> Y	0.428	0.423	0.110	3.903	0.000	Diterima

Sumber : Output SmartPLS (data diolah, 2026)

Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji hipotesis diatas, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,244, nilai t-statistik sebesar 3,573, serta p-value sebesar 0,000. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa variabel X1 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan karena nilai p-value berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Namun, pengaruh yang ditunjukkan memiliki arah negatif. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat dinyatakan diterima.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,198 dengan nilai t-statistik 2,069 dan p-value 0,039. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel X2 memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima karena nilai signifikansinya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

3. Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,549 dengan nilai t-statistik 4,335 dan p-value 0,000. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa variabel X3 memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima karena telah memenuhi kriteria signifikansi yang ditetapkan.

4. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hasil pengujian data, diperoleh nilai koefisien sebesar 0,428 dengan nilai t-statistik sebesar 3,903 serta p-value sebesar 0,000. Temuan tersebut menunjukkan bahwa variabel X4 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada BAB IV, penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independent, yaitu sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), sistem pengendalian internal (SPI, *good governance*, dan kualitas sumber daya manusia (SDM), memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pemerintahan kota probolinggo.

Namun demikian, arah pengaruh masing-masing variabel menunjukkan karakteristik yang berbeda. Variabel SIPD memiliki arah pengaruh negative signifikan, sedangkan SPI, *Godd Governance*, dan kualitas SDM memiliki arah pengaruh positif signifikan. Temuan ini memberikan gambaran bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh tata Kelola, pengendalian, serta kompetensi aparatur pemerintah.

4.2.1 Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, namun dengan arah koefisien negatif. Artinya, peningkatan implementasi SIPD yang belum optimal justru berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan. Kondisi ini dapat diinterpretasikan bahwa keberadaan sistem informasi belum tentu secara otomatis meningkatkan kualitas pelaporan apabila belum didukung kesiapan organisasi, kualitas data, integrasi sistem, dan kemampuan pengguna.

Dalam temuan ini dapat dijelaskan melalui Teori *Stewardship* yang menekankan bahwa aparatur pemerintah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Davis *et al.*, 1997). Dalam konteks ini, SIPD merupakan instrument yang dirancang untuk aparatur pemerintah dalam menjalankan Amanah tersebut melalui proses penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan yang lebih terintegrasi. Namun, apabila implementasi SIPD belum berjalan optimal, maka peran aparatur sebagai pengelola keuangan publik juga belum dapat terlaksana secara maksimal. Hambatan seperti kurangnya pemahaman pengguna, kendala teknis sistem, dan kurangnya kesiapan organisasi dapat menyebabkan sistem belum mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal, relevan, dan tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Napitupulu *et al.*, 2024 yang menjelaskan bahwa implementasi SIPD di berbagai daerah masih menghadapi tantangan teknis, resistensi pengguna, dan kesiapan

infrastruktur. Penelitian Kahfi, 2025 juga menyebutkan bahwa efektivitas SIPD sangat bergantung pada kualitas implementasi dan kesiapan SDM. Perbedaan hasil tersebut dimungkinkan karena variasi tingkat kesiapan organisasi, dukungan pimpinan, kualitas infrastruktur digital, serta pengalaman pengguna antar daerah. Dalam konteks pemerintahan kota Probolinggo, arah negatif ini mengindikasikan bahwa implementasi SIPD masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam aspek pelatihan, integrasi data, dan penyederhanaan proses kerja.

Secara praktis, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas implementasi SIPD melalui pelatihan rutin, peningkatan server dan jaringan, penyusunan SOP penggunaan sistem, serta pendampingan teknis berkelanjutan. Secara teoritis, temuan ini memperkuat Teori *Stewardship* bahwa keberhasilan aparatur pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab publik tidak hanya ditentukan oleh niat dan komitmen, tetapi juga oleh sistem informasi yang efektif sebagai sarana pelaksanaan tugas organisasi.

4.2.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Sistem Pengendalian Internal berperan secara positif dan signifikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, semakin efektif penerapan sistem pengendalian internal dalam suatu instansi pemerintah, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Temuan penelitian ini mendukung ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai terhadap tercapainya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, keandalan penyajian laporan keuangan, perlindungan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP, 2008). Dalam perspektif *Stewardship theory*, aparatur pemerintah sebagai pengelola dituntut bekerja demi kepentingan organisasi dan masyarakat, sehingga sistem pengendalian menjadi sarana penting untuk menjalankan tanggung jawab tersebut secara optimal.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Hanif *et al.*, 2023 yang mengungkapkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal dapat mendorong peningkatan tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Ramadhani & Yaya, 2024 juga menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik.

Secara praktis, hasil ini menegaskan pentingnya pemisahan tugas, otorisasi transaksi, audit internal, pemantauan rutin, serta pengelolaan risiko pada OPD. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat bahwa kualitas pelaporan sektor publik sangat dipengaruhi oleh efektivitas sistem pengendalian internal.

4.2.3 Pengaruh *Good Governance* terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan *Good Governance* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan praktik tata kelola pemerintahan yang baik akan diikuti oleh peningkatan kualitas informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. *Good Governance* mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan pada hukum. Dalam pengelolaan keuangan daerah, prinsip-prinsip tersebut mendorong penyusunan laporan keuangan yang jujur, relevan, andal, dan tepat waktu.

Temuan ini juga sejalan dengan *Agency Theory* yang menjelaskan bahwa laporan keuangan menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah sebagai agen kepada masyarakat sebagai *principal* (Jensen & Meckling, 1976). Hasil penelitian ini mendukung temuan Ardiansyah *et al.*, 2025 yang menyatakan bahwa penerapan *good governance* mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian Hosana *et al.*, n.d. juga menunjukkan adanya hubungan positif antara *good governance* dan kualitas pelaporan keuangan.

Secara praktis, pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi anggaran, keterbukaan informasi publik, pengawasan masyarakat, dan budaya akuntabilitas kinerja. Secara teoritis, hasil ini menegaskan bahwa kualitas laporan

keuangan sektor publik tidak hanya dipengaruhi aspek teknis akuntansi, tetapi juga kualitas tata kelola lembaga.

4.2.4 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan daerah

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kompetensi dan kemampuan pegawai akan mendorong terciptanya laporan keuangan yang semakin berkualitas. Kualitas SDM mencakup pengetahuan akuntansi, kemampuan teknis, pengalaman kerja, pelatihan, integritas, serta kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan aturan dan teknologi.

Dalam perspektif *Stewardship theory*, aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk bekerja demi kepentingan organisasi serta masyarakat (Davis *et al.*, 1997). Karena itu, pegawai yang kompeten akan lebih mampu menyusun laporan keuangan yang akurat, transparan, dan akuntabel. Sementara dalam *Agency Theory*, pemerintah sebagai agen wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat, sehingga kualitas SDM menjadi faktor penting untuk meminimalkan kesalahan pelaporan dan meningkatkan kepercayaan publik (Jensen & Meckling, 1976).

Hasil ini sejalan dengan penelitian Mediaty *et al.*, 2025 yang menyatakan bahwa kompetensi SDM memperkuat kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Temuan serupa juga disampaikan oleh Rahmawati *et al.*, 2022 yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM berkontribusi penting terhadap kualitas laporan keuangan. Secara praktis, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan berkelanjutan, sertifikasi, pelatihan akuntansi pemerintah, pelatihan SIPD, serta promosi berbasis kompetensi. Secara teoritis, hasil ini menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan sektor publik sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam menjalankan tanggung jawabnya.

BAB V

KESIMPULAN

4.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), Good Governance, dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Probolinggo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa SIPD memiliki pengaruh signifikan, namun dengan arah hubungan negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi SIPD yang belum optimal, kendala teknis, atau adaptasi pengguna yang belum maksimal dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, rumusan masalah pertama terjawab bahwa SIPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik penerapan pengendalian internal, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan, pemisahan tugas, serta prosedur pengendalian yang efektif mampu meminimalkan kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan. Rumusan masalah kedua dinyatakan terjawab.
3. Good Governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi terbukti mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, semakin baik tata Kelola pemerintahan, maka semakin baik pula kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Rumusan masalah ketiga terjawab.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi pegawai, pemahaman akuntansi pemerintahan, pengalaman kerja, dan kemampuan teknis aparatur berkontribusi nyata dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan tepat waktu. Rumusan masalah keempat dinyatakan terjawab.
5. SIPD, SPI, Good Governance, dan Kualitas SDM berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya dipengaruhi satu faktor, tetapi merupakan hasil sinergi antara sistem informasi, pengendalian internal, tata Kelola, dan kompetensi aparatur. Rumusan masalah kelima dinyatakan terjawab.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat penerapan *stewardship theory* dan *agency theory* dalam konteks sektor publik, bahwa aparatur pemerintah memerlukan sistem pengawasan yang baik sekaligus orientasi pelayanan publik untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Kota Probolinggo dalam meningkatkan tata Kelola keuangan daerah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan pada Pemerintahan Kota Probolinggo, penggunaan data persepsi responden melalui kuesioner, serta keterbatasan variabel penelitian yang hanya berfokus pada empat faktor utama. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu diinterpretasikan sesuai konteks penelitian. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambah variabel lain seperti komitmen organisasi, budaya kerja, audit internal, manajemen risiko, dan pemanfaatan teknologi digital lainnya, serta memperluas objek penelitian pada pemerintah daerah lain agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

4.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Probolinggo

Disarankan untuk terus mengoptimalkan implementasi SIPD melalui peningkatan infrastruktur teknologi, stabilitas jaringan, integrasi data antar perangkat daerah, serta pemeliharaan sistem secara berkala agar proses pelaporan keuangan berjalan lebih efektif dan efisien.

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Perlu memperkuat sistem pengendalian internal melalui peningkatan fungsi pengawasan, evaluasi berkala, pemisahan tugas yang jelas, serta penerapan manajemen risiko agar kesalahan dan potensi penyimpangan dapat diminimalkan.

3. Bagi Pimpinan Daerah dan Pemangku Kebijakan

Disarankan untuk memperkuat penerapan prinsip *good governance* melalui peningkatan transparansi anggaran, akuntabilitas kinerja, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

4. Bagi Aparatur Pemerintah Daerah

Perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan di bidang akuntansi sektor publik, teknologi informasi, serta regulasi keuangan daerah agar kualitas SDM semakin meningkat dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem digital.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel lain yang relevan, menggunakan metode campuran (*mixed methods*), atau membandingkan beberapa pemerintahan daerah sehingga diperoleh hasil yang lebih mendalam dan luas.

6. Bagi Peneliti Mendatang

Untuk mengatasi keterbatasan penelitian ini, disarankan memperluas jumlah responden, menambah cakupan wilayah penelitian, serta menggunakan data primer dan sekunder secara bersamaan agar validitas serta generalisasi temuan semakin kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan.
- 2008, P. N. 6. T. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- 2019, P. N. 70 T. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. 1114.
- Anthony, Handayani, M., Eriva, C. Y., & Farlian, T. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1, 1–11.
- Ardiansyah, M. I., Khairiah, A., Sitepu, A. M., Simanjorang, M., & Supraja, G. (2025). Analisis Penerapan Good Governance Dalam Mendukung Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 55–75.
- Ardianti, E. P. (2018). Pengaruh Penerapan Good Governance, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(2), 54–69.
- BPK, B. P. K. (2023). *BPK Ungkap 9.261 Temuan Senilai RP18,19 Triliun pada Semester I Tahun 2023*.
- BPK RI. (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024*. Badan Pemeriksa Keuangan.
- BPPKAD. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022*. BPPKAD.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward A Stewardship Theory OF Management. *Academy of Management Review*, 22.
- Delone, W. H., & McLean, E. R. (2003). *The DeLone and McLean Model of Information Systems Success : A Ten-Year Update*. 19(4), 9–30.
- Delone, W. H., & McLean, E. R. (2016). *Information Systems Success Measurement*.
- Fitriah, R. N. (n.d.). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan*. 1–13.
- Fitriani, L., & Solikhin, A. (2024). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Dimoderasi Oleh Teknologi Informasi. *Jurnal*

Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu), 13(05), 1548–1561.

- Fitriasari, D. (2024). Pengaruh Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(2), 34–54.
- Hair, J. F., Howard, M. C., & Nitzl, C. (2020). Assessing measurement model quality in PLS-SEM using confirmatory composite analysis. *Journal of Business Research*, 109(August 2019), 101–110. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.11.069>
- Hanif, R. A., Silalahi, S. P., Supriono, S., Hariyani, E., & Wiguna, M. (2023). Disclosure level of local government ' s financial statements in Indonesia : Role of the internal control system. *Investment Management and Financial Innovations*, 20(3). [https://doi.org/10.21511/imfi.20\(3\).2023.02](https://doi.org/10.21511/imfi.20(3).2023.02)
- Hardani, P., Ustiawaty, J., Andriani, H., & Sukmana, D. J. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Hasmuddin, Kamariah, N., & Mauliana, D. (2024). Implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi &bisnis Islam (El-Mal)*, 5(10), 4385–4406.
- Hosana, A. T., Rispantyo, & Widarno, B. (n.d.). Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangankdengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Aparatur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Karanganyar). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 158–168.
- Hussein, A. S. (2015). Penelitian Bisnis dan Manajemen Menggunakan Partial Least Squares (PLS) dengan smartPLS 3 . 0. *Universitas Brawijaya*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1023/A:1023202519395>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Kahfi, Z. N. Al. (2025). *Efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di provinsi lampung*. 1–15.
- Karso, A. J. (2022). *GOOD GOVERNANCE*.
- Khadijah, & Juniarti, I. (2025). Mewujudkan Good Governance Melalui Penguatan Sistem Pengendalian Internal Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 19(1), 18–26.
- Leiwakabessy, T. F. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Informasi Akuntansi

- Terhadap Proses Pelaporan Keuangan Kabupaten Maluku Barat Daya The. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11, 214–224.
- Maspaitella, M. R., & Mokodompit, M. P. (2022). The quality of local government financial report. *Global Financial Accounting Journal*, 06(01), 31–38.
- Mediaty, Pontoh, G. T., Nagu, N., Hs, R., Mas'ud, A. A., & Aziz, R. H. A. (2025). Human Competencies : Amplifying Financial Reporting Quality in Indonesian Local Government. *Riks and Financial Management*, 23, 1–21.
- Mukarromah, A. 'Ainul. (2021). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Skpd Pemerintah Kota Probolinggo*.
- Mustaqmah, S. A., & Putri, D. P. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Dayamanusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simd) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi. *Menara Ekonomi*, Viii(1), 181–197.
- Muttaqin, I., Adiranti, U., Dewi, R., & Rf, Z. (2023). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kota Probolinggo. *JURNAL AKUNTANSI BISNIS DAN EKONOMI*, 9(77), 2310–2318.
- Naida, N. (2024). Optimalisasi SIPD dan SPIP dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan : Pentingnya Kompetensi SDM. *SOLUSI : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 22(4), 465–479. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i4.10554>
- Napitupulu, D. L., Bancin, M. R. H., Lubis, T. A., Juanda, R. A., & Sari, E. N. (2024). Implementation and Effectiveness Of Local Government Information System (SIPD) In Indonesia: A Literature Study. *Medan International Economics and Business*, 2(1), 1901–1919.
- Nations, U. (2022). *UNITED NATIONS E-GOVERNMENT SURVEY 2022*.
- Pegunungan, K. P. (2025). *Mengenal prinsip good governance: Pengertian, penerapan dan tantangan di Indonesia*.
- Philadelphialpha, I. S., Suryaningsum, S., & Sriyono. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *J-Iskan: Journal Of Islamic Accounting Research*, 2(1), 17–35.
- Pituringasih, E., Sokarina, A., & Asmony, T. (2025). Implementation of local government information systems as a mediator determinant of financial reporting quality in regional organizations. *Management, Economics & Accounting*, 8.

- Raharjo, E. (2007). (Agency Theory Vs Stewardship Theory in the Accounting Perspective). *Fokus Ekonomi*, 2.
- Rahmawati, E., Sonita, S., Kholid, A. W. N., & Sofyani, H. (2022). KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: PERAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI PEMEDIASI. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 346–359. <https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.21791>
- Ramadhani, N., & Yaya, R. (2024). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Moderasi Determinants of Local Government Financial Report Quality with Internal Control System as Moderating Variable. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika Available*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.37859/jae.v14i1.6064>
- Ridzal, N. A., Sujana, I. W., & Malik, E. (2022). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia , Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 3094–3104.
- Salsabila, A. (2024). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Pemerintahan Kabupaten Bantul*.
- Sanjaya, A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kab. Soppeng). *Skripsi*.
- Setiabudhi, H., Suwono, Setiawan, Y. A., & Karim, S. (2024). *Analisis Data Kuantitatif Dengan Smart Pls 4*.
- Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2024). *Aplikasi Smartpls Untuk Statistisi Pemula*.
- Sugiono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif Dan R&D*.
- Wahyudi, K. P., Sinurat, M., Romarina, A., & Johannes, A. W. (2024). Optimalisasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Gianyar. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 11, 27–38.
- WorldBank. (2023). *Strengthening Public Financial Management Systems in Developing Countries*. World Bank Group.
- Wulandari, A. D., & Yuliati, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualiatas Laporan Keuangan (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Jember). *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 7, 637–649.

- Yenni, E., Junaedia, A. T., & Wijaya, E. (2024). Journal of Applied Business and Technology The Impact of Government Accounting Standards Implementation , Internal Control Systems , and Human Resource Competence on Regional Financial. *Journal of Applied Business and Technology*, 5(3), 134–145.
- Yulianda, D., Lubis, N. K., & Azhar, I. (2022). Pengaruh Kompetensi Pengguna, Teknologi Informasi Dan Implementasi SIPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3, 794–804.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perkenalkan, saya Sinta Angraini, Mahasiswa Program Studi S1 Ekonomi Fakultas Akuntansi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saat ini saya sedang melaksanakan penelitian skripsi dengan judul: “Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), *Good Governance*, dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pemerintah Kota Probolinggo.” Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan menganalisis pengaruh penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Sistem Pengendalian Internal (SPI), prinsip *Good Governance*, serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Melalui kuesioner ini, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban sesuai dengan kondisi dan pengalaman kerja yang sebenarnya. Tidak terdapat jawaban benar atau salah dalam pengisian kuesioner ini. Setiap jawaban yang diberikan akan sangat berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola pemerintahan daerah. Seluruh data dan informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya serta hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Partisipasi Bapak/Ibu bersifat sukarela dan menjadi bentuk kontribusi yang sangat berharga dalam mendukung penelitian ini.

Kriteria responden penelitian ini adalah:

- Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah Kota Probolinggo

Dengan melanjutkan pengisian kuesioner ini, Bapak/Ibu menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi sebagai responden penelitian serta memberikan persetujuan secara sukarela dan sadar. Apabila Bapak/Ibu memiliki pertanyaan atau membutuhkan informasi lebih lanjut terkait penelitian ini, saya dengan hormat mempersilakan untuk menghubungi saya.

Email : sintaangraini0105@gmail.com

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

A. Identitas Responden

- 1) Nama atau Inisial
- 2) Jenis Kelamin
- 3) Usia (contoh : 22)
- 4) Nama Organisasi Pemerintahan (contoh : bidang pendapatan)
- 5) Lama / masa kerja (contoh : 10 tahun)

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

- 1) Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner dimohon kepada responden untuk dahulu mengisi identitas sesuai dengan formulir isian yang disediakan.
- 2) Dimohon untuk menjawab setiap pertanyaan sesuai pendapat saudara. Dengan memberikan satu pilihan terhadap setiap pernyataan.
- 3) Berikut disajikan pernyataan dengan 5 kemungkinan pilihan:

SS = (Sangat Setuju) : 5

S = (Setuju) : 4

KS = (Kurang Setuju) : 3

TS = (Tidak Setuju) : 2

STS = (Sangat Tidak Setuju) : 1

C. Pertanyaan Penelitian

1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (X1)						
No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Tampilan menu SIPD jelas dan mudah dipahami.					
2	Informasi yang disajikan dalam SIPD lengkap dan sesuai kebutuhan.					
3	Petugas SIPD memiliki kemampuan teknis yang baik dalam menangani masalah pengguna.					
4	Saya menggunakan SIPD secara rutin dalam pekerjaan sehari-hari.					
5	Saya merasa puas dengan penggunaan SIPD secara keseluruhan.					
6	SIPD meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.					

2. Sistem Pengendalian Internal (SPI) (X2)						
No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Pimpinan memastikan bahwa penerapan sistem akuntansi di organisasi pemerintahan daerah (OPD) telah sesuai dengan Standar					

	Akuntansi Pemerintahan (SAP).					
2	Organisasi pemerintahan daerah (OPD) melakukan identifikasi risiko yang berkaitan dengan pencatatan transaksi agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan.					
3	Organisasi pemerintahan daerah (OPD) melakukan pengklasifikasian transaksi secara tepat.					
4	Sistem pengendalian internal di OPD mampu menghasilkan informasi keuangan yang dapat diukur dan dilaporkan dengan baik.					
5	Laporan keuangan disusun rutin setiap periode sebagai pemantauan.					

3. Good Governance (X3)						
No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Informasi mengenai anggaran, kegiatan, dan realisasi keuangan pada organisasi pemerintahan					

	daerah disampaikan secara terbuka dan mudah diakses.					
2	Laporan keuangan, kinerja, dan seluruh dokumen pendukung di organisasi pemerintahan daerah disusun sesuai standar yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan profesional					
3	Organisasi pemerintah daerah menyediakan ruang dan sarana bagi pegawai maupun pihak terkait untuk menyampaikan masukan, serta mempertimbangkan aspirasi tersebut secara serius dalam pengambilan keputusan.					
4	Program dan kegiatan di organisasi pemerintah daerah dilaksanakan tepat waktu, memberikan manfaat yang jelas bagi pencapaian tujuan organisasi, serta menghasilkan output yang berkualitas sesuai standar yang telah ditetapkan.”					
5	Pegawai di organisasi pemerintahan daerah					

	melaksanakan tugas sesuai SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi etika, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan pekerjaan.					
--	---	--	--	--	--	--

4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (X4)						
No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Saya selalu memperhatikan ketelitian dalam setiap tugas yang saya kerjakan.					
2	Saya mampu bekerja sama dalam tim secara efektif.					
3	Saya mampu menggunakan informasi yang ada untuk menyelesaikan pekerjaan secara efektif.					

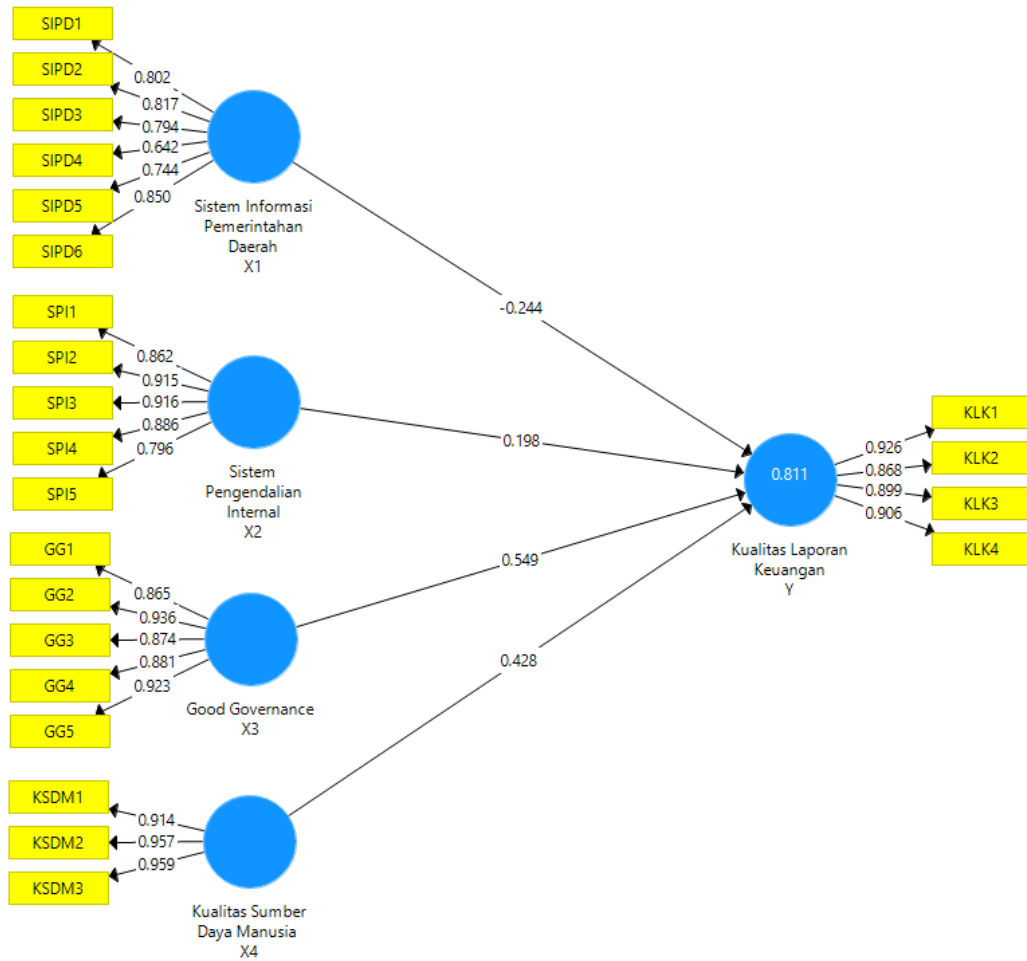
5. Kualitas Laporan Keuangan (Y)						
No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Laporan keuangan organisasi pemerintahan daerah (OPD) sudah					

4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5
5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	2	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	4	4
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4
5	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
4	4	4	3	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5
4	3	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4
5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4
4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	5	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5

4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4
5	4	4	4	5	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5

Lampiran 3: OUTPUT SMARTPLS 4

Hasil Uji Outer Model



1. Hasil Uji Convergent Validity

Matrix	GG_X3	KLK_Y	KSDM_X4	SIPD_X1	SPI_X2
GG1	0.865				
GG2	0.936				
GG3	0.874				
GG4	0.881				
GG5	0.923				
KLK1		0.926			
KLK2		0.868			
KLK3		0.899			
KLK4		0.906			
KSDM1			0.914		
KSDM2			0.957		
KSDM3			0.959		
SIPD1				0.802	
SIPD2				0.817	
SIPD3				0.794	
SIPD4				0.642	
SIPD5				0.744	

SIPD6					0.850	
SPI1						0.862
SPI2						0.915
SPI3						0.916
SPI4						0.886
SPI5						0.796

2. Hasil Uji Discriminant Validity

	GG_X3	KLK_Y	KSDM_X4	SIPD_X1	SPI_X2
GG1	0.865	0.765	0.670	0.677	0.771
GG2	0.936	0.799	0.691	0.684	0.745
GG3	0.874	0.708	0.591	0.676	0.725
GG4	0.881	0.704	0.636	0.669	0.670
GG5	0.923	0.759	0.681	0.724	0.709
KLK1	0.755	0.926	0.791	0.550	0.659
KLK2	0.695	0.868	0.665	0.525	0.687
KLK3	0.750	0.899	0.719	0.478	0.619
KLK4	0.802	0.906	0.751	0.532	0.674
KSDM1	0.640	0.746	0.914	0.543	0.609
KSDM2	0.699	0.761	0.957	0.558	0.610
KSDM3	0.727	0.797	0.959	0.559	0.614
SIPD1	0.541	0.422	0.469	0.802	0.602
SIPD2	0.541	0.348	0.359	0.817	0.562
SIPD3	0.596	0.415	0.460	0.794	0.583
SIPD4	0.561	0.435	0.430	0.642	0.459
SIPD5	0.522	0.339	0.411	0.744	0.585

3. Hasil Uji Reabilitas dan Validitas

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
GG_X3	0.939	0.941	0.953	0.803
KLK_Y	0.922	0.924	0.945	0.810
KSDM_X4	0.938	0.940	0.960	0.890
SIPD_X1	0.869	0.896	0.901	0.605
SPI_X2	0.923	0.926	0.943	0.767

Hasil Uji Inner Model

1. R-Square

	R Square	R Square Adjusted
KLK_Y	0.811	0.804

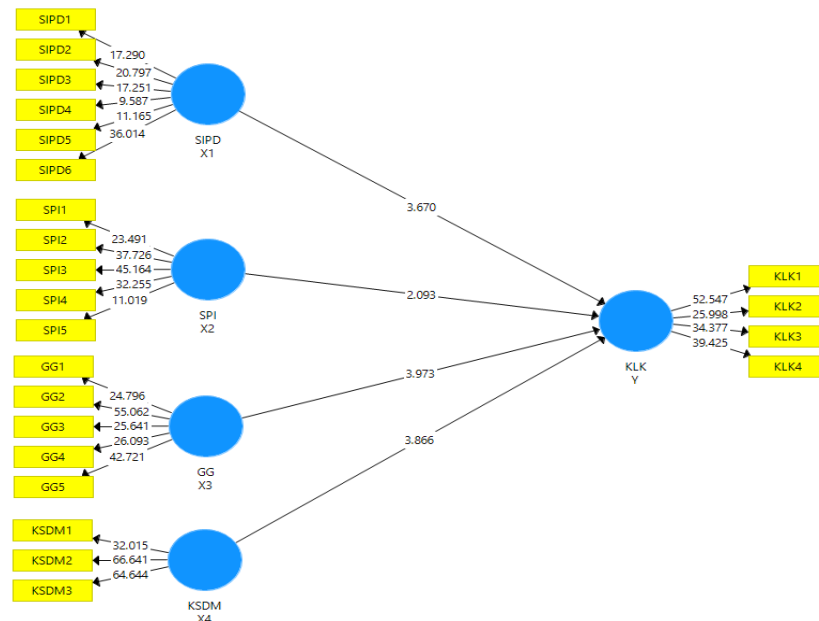
2. Q-Square

	SSO	SSE	Q ² (= 1-SSE/SSO)
GG_X3	610.000	610.000	
KLK_Y	488.000	172.286	0.647
KSDM_X4	366.000	366.000	
SIPD_X1	732.000	732.000	
SPI_X2	610.000	610.000	

3. F-Square

	GG_X3	KLK_Y	KSDM_X4	SIPD_X1	SPI_X2
GG_X3		0.382			
KLK_Y					
KSDM_X4		0.443			
SIPD_X1		0.111			
SPI_X2		0.060			

4. Hasil Uji Bootstrapping



5. Hasil Path Coefficient

	GG_X3	KLK_Y	KSDM_X4	SIPD_X1	SPI_X2
GG_X3		0.549			
KLK_Y					
KSDM_X4		0.428			
SIPD_X1		-0.244			
SPI_X2		0.198			

Lampiran 4: Biodata Penulis

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Sinta Angraini
 Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 26 Maret 2004
 Alamat : Krampilan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo
 Telepon : 085736400750
 Email : sintaangraini0105@gmail.com

Pendidikan Formal

2010-2016 : SDN KRAMPILAN
 2016-2019 : SMP ISLAM ISLAMIYAH SYAFI'YAH
 2019-2022 : MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 PROBOLINGGO
 2022-2026 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal

2022-2023 : MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 2022-2023 : (PKPBA) Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 2022-2023 : ELC (*English Language Center*) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

2022-2023 : Anggota PMII

Sertifikasi dan Pelatihan

1. *Certified Accurate Professional (CAP)*
2. Pelatihan ATLAS (*Software Auditing*)

Lampiran 5. Jurnal Bimbingan

6/17/26, 10:15 AM
#Print Jurnal Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM	: 220502110003
Nama	: Sinta Angraini
Fakultas	: Ekonomi
Program Studi	: Akuntansi
Dosen Pembimbing	: Zuraidah, M.S.A
Judul Skripsi	: PENGARUH SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD), SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI), <i>GOOD GOVERNANCE</i>, DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	24 September 2025	Pengajuan Judul	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
2	23 Oktober 2025	Bimbingan Bab 1	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
3	27 Oktober 2025	Bimbingan Bab 2	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
4	7 November 2025	Bimbingan Bab 1,2, & 3	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
5	2 Maret 2026	Bimbingan Kuesioner Penelitian	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
6	10 April 2026	Hasil Olah Data & Jurnal Publikasi	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
7	30 April 2026	Bimbingan Bab 4&5	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
8	5 Mei 2026	Bimbingan Artikel	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
9	11 Mei 2026	Bimbingan sitasi artikel	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
10	8 Juni 2026	Bimbingan Review Revisi Artikel	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
11	13 Juni 2026	ACC Skripsi & Jurnal	Genap 2025/2026	Sudah Dikoreksi

Malang, 13 Juni 2026
 Dosen Pembimbing

<https://accessfe.uin-malang.ac.id/print/bimbingan/2142>
1/2

6/17/26, 10:15 AM

Print Jurnal Bimbingan Skripsi



Zuraidah, M.S.A

Lampiran 6. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

6/17/26, 12:52 PM

Print Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Sinta Angraini
NIM : 220502110003
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : **PENGARUH SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD),
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI), *GOOD GOVERNANCE*, DAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
25%	18%	18%	20%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 17 Juni 2026
UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd